

**TINDAK TUTUR BERJANJI DALAM DEBAT CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
INDONESIA TAHUN 2014**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana Strata 2

Magister Linguistik

**Rani Jayanti
13020213410014**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

TESIS


**TINDAK TUTUR BERJANJI DALAM DEBAT CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA
TAHUN 2014**

Disusun oleh:

Rani Jayanti
13020213410014

Telah disetujui oleh Pembimbing
Penulisan Tesis pada tanggal 20 Januari 2016


Pembimbing,



Dr. Nurhayati, M. Hum.
NIP. 196610041990012001

Ketua Program Studi

Magister Linguistik,



Dr. Agus Subiyanto, M.A.
NIP. 196408141990011001

TESIS

**TINDAK TUTUR BERJANJI DALAM DEBAT CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA
TAHUN 2014**

Disusun oleh:

**Rani Jayanti
13020213410014**

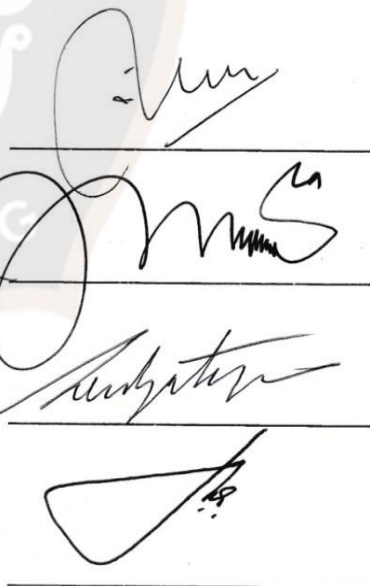
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
pada tanggal 27 Januari 2016
dan dinyatakan diterima

**Ketua Penguji
Dr. Nurhayati, M. Hum.**

**Penguji I
Dr. Deli Nirmala, M.Hum.**

**Penguji II
Yoseph Herudjati Purwoko, Ph.D.**

**Penguji III
Dr. M. Suryadi, M.Hum.**



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil kerja penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, Sumbernya disebutkan dan dijelaskan di dalam teks dan daftar pustaka. Apabila penulis terbukti melakukan tindakan plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang diterapkan di Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, 20 Januari 2016



Rani Jayanti
13020213410014

MOTTO

“Orang yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya.”

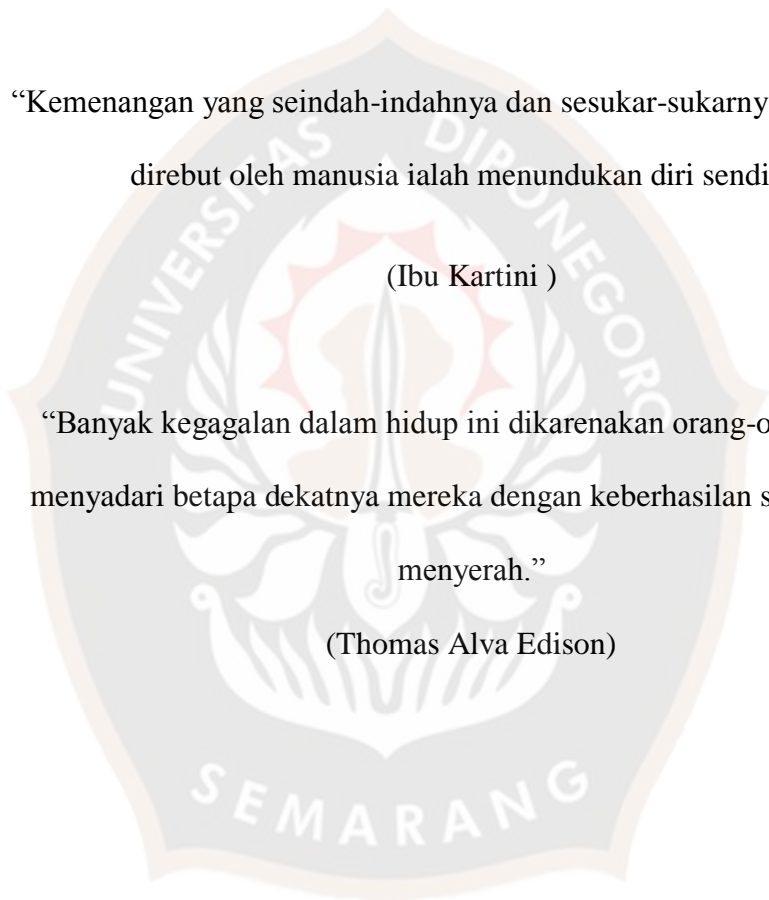
(Opick)

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.”

(Ibu Kartini)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu setia menemani, membantu, dan membimbing penulis sehingga tesis berjudul “*Tindak Tutur Berjanji dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014*” dapat terselesaikan. Tanpa bantuan-Nya, mustahil tesis ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa selalu penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Agus Subiyanto, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro yang selalu memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh studi.
2. Dr. Deli Nirmala, M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro yang selalu memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses penulisan tesis ini.
4. J. Herudjati Purwoko, Ph.D, Dr. Suharno, M.Ed, Dr. M. Suryadi, M. Hum., dan seluruh dosen program studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
5. Mas Akhlis dan Mas Wahyu selaku staf Bapendik Program Studi Universitas Diponegoro yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

6. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah membantu penulis sehingga penulis bisa melanjutkan sampai tingkat pascasarjana (S2).
7. Kedua orang tua penulis, Ngadiman dan Sukarti yang selalu memberikan dukungan secara moral maupun material sehingga penulis dapat menempuh studi di Program Studi Magister Linguistik Universitas Diponegoro.
8. Sumantri, selaku pasangan setia penulis yang memberikan dukungannya selama menempuh studi di Program Studi Magister Linguistik.
9. Imdam Mumtaza anakku yang lucu sekarang genap berumur 5 bulan yang selama ini menjadi penyemangat penulis dalam menulis tesis ini.
10. Pahriyono Damanhuri, M.Si, Khoiriyah, Iwan Susanto, Rini suliswati, Nurul Limsaadah, Wahyu Nurfadhilah, Laili Yusuf, Rosi, Akbar, Muhajir, Faqih, selaku Keluarga dan sahabat penulis yang selalu bersedia membantu penulis selama menempuh studi.

penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu diharapkan penulis demi sempurnanya tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Semarang, 20 Januari 2016

Rani Jayanti

Intisari

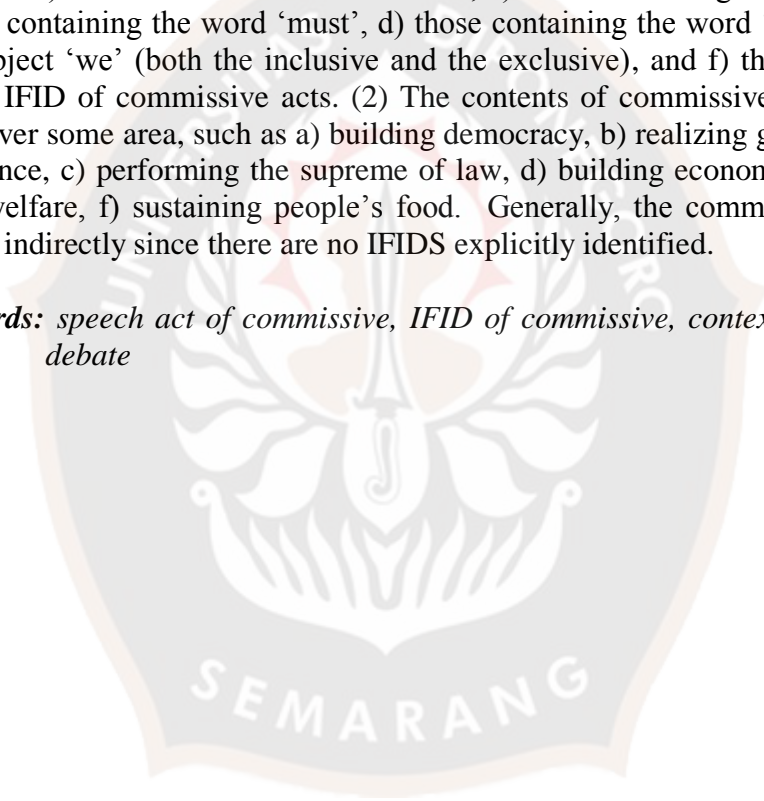
Tindak tutur merupakan salah satu domain kajian pragmatik yang dapat dipahami bahwa mengatakan sesuatu berarti melakukan suatu tindakan. Penelitian ini berfokus pada kajian tindak tutur berjanji dengan objek debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2014. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bentuk linguistik tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh kandidat dan menjelaskan isi tindak tutur berjanji yang dilakukan oleh para kandidat tersebut. Teori tindak tutur Searle dan teori kondisi kelayakan Mey digunakan dalam analisis kajian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data penelitian berupa tuturan berjanji. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, mencakupi tiga langkah, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk linguistik tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh para kandidat mencakupi tindak tutur berjanji yang: a) disampaikan dengan struktur kalimat kondisional, b) mengandung modalitas kata ‘ingin’, c) mengandung modalitas kata ‘harus’, d) mengandung modalitas kata ‘akan’, e) disampaikan dengan subjek kata ‘kami’ dan ‘kita’, f) disampaikan tanpa IFID berjanji. Ditemukan juga bahwa isi tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh para kandidat mencakupi beberapa bidang, yaitu berjanji untuk: a) membangun demokrasi, b) mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan c) menegakkan kepastian hukum, d) membangun ekonomi, e) membangun kesejahteraan sosial, dan f) meningkatkan pangan. Pada umumnya, tindak tutur berjanji dalam debat ini dilakukan tanpa IFID berjanji dan disampaikan secara langsung.

Kata kunci: *tindak tutur berjanji, IFID berjanji, konteks, debat calon presiden dan calon wakil presiden*

Abstract

Speech act is a domain of pragmatics which can be understood as saying something is doing something. This study is on speech commissive acts uttered by the president and vice president candidates at the presidential debate of Indonesia in 2014. It is aimed at explaining the forms and the contents of commissive acts performed by the candidates. The theories employed are those introduced by Searle on speech acts and those developed by Mey on felicity condition. It is qualitative research and the data are the commissive utterances analyzed by using the model developed by Miles & Huberman covering reduction, presentation, and conclusion or verification. The results reveal that (1) the forms of commissive acts consist of a) those with conditional sentence, b) those containing the word 'want', c) those containing the word 'must', d) those containing the word 'will', e) those with subject 'we' (both the inclusive and the exclusive), and f) those performed without IFID of commissive acts. (2) The contents of commissive acts done by them cover some area, such as a) building democracy, b) realizing good and clean governance, c) performing the supreme of law, d) building economy, e) building social welfare, f) sustaining people's food. Generally, the commissive acts are realized indirectly since there are no IFIDS explicitly identified.

Key words: *speech act of commissive, IFID of commissive, context, presidential debate*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PRAKATA..... | v |
| INTISARI..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Tinjauan Pustaka..... | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Ruang Lingkup..... | 7 |
| BAB II : LANDASAN TEORI..... | 9 |
| 2.1 Konteks dalam Pragmatik..... | 9 |
| 2.2 Tindak Tutur..... | 11 |
| 2.2.1 Definisi Tindak Tutur..... | 12 |
| 2.2.2 Tiga Tindak yang Dilakukan dalam Bertindak Tutur..... | 12 |
| 2.2.3 Jenis Tindak Tutur..... | 14 |
| 2.3 Tindak Tutur Berjanji..... | 18 |
| 2.3.1 Definisi Berjanji..... | 18 |
| 2.3.2 Kondisi Berjanji..... | 19 |
| 2.3.3 IFID (<i>Illocutionary Force Indicating Device</i>)..... | 20 |
| 2.4 Tindak Tutur Berjanji dengan Verba atau Tanpa Verba Performatif..... | 21 |
| 2.5 Tindak Tutur Langsung dan Tidak Langsung..... | 22 |
| 2.6 Debat Presiden Sebagai Bentuk Wacana Politik..... | 23 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 27 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 27 |
| 3.2 Data dan Sumber Data..... | 28 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.4 Teknik Analisis Data..... | 29 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| 4.1 Bentuk Linguistik Tindak Tutar Berjanji yang Disampaikan Para Kandidat..... | 33 |
| 4.1.1 Tindak Tutar Berjanji yang Disampaikan dengan Struktur Kalimat Kondisional..... | 34 |
| 4.1.2 Tindak Tutar Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘ingin’..... | 36 |
| 4.1.3 Tindak Tutar Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘harus’..... | 37 |
| 4.1.4 Tindak Tutar Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘akan’..... | 39 |
| 4.1.5 Tindak Tutar Berjanji dengan Subjek Kata ‘kami’ dan ‘kita’..... | 41 |
| 4.1.6 Tindak Tutar Berjanji yang Disampaikan dengan Verba Performatif Implisit (Tanpa IFID Berjanji)..... | 44 |
| 4.2 Isi Tuturan Berjanji yang Diungkapkan oleh Para Kandidat..... | 46 |
| 4.2.1 Janji yang Diungkapkan oleh Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1..... | 46 |
| 4.2.1.1 Berjanji untuk Membangun Demokrasi..... | 49 |
| 4.2.1.2 Berjanji untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih..... | 51 |
| 4.2.1.3 Berjanji untuk Menegakkan Kepastian Hukum..... | 60 |
| 4.2.1.4 Berjanji untuk Membangun Ekonomi..... | 65 |
| 4.2.1.5 Berjanji untuk Membangun Kesejahteraan Sosial..... | 67 |
| 4.2.1.6 Berjanji untuk Meningkatkan Pangan..... | 72 |
| 4.2.2 Janji yang Diungkapkan oleh Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2..... | 75 |
| 4.2.2.1 Berjanji untuk Membangun Demokrasi..... | 78 |
| 4.2.2.2 Berjanji untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih..... | 82 |
| 4.2.2.3 Berjanji untuk Menegakkan Kepastian Hukum..... | 87 |
| 4.2.2.4 Berjanji untuk Membangun Ekonomi..... | 90 |
| 4.2.2.5 Berjanji untuk Membangun Kesejahteraan Sosial..... | 92 |
| 4.2.2.6 Berjanji untuk Meningkatkan Pangan..... | 94 |
| 4.3 Perbedaan Bentuk Linguistik dan Isi Janji dalam Tuturan..... | 96 |
| BAB V : PENUTUP | |
| 5.1 Simpulan..... | 100 |
| 5.2 Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa orang bertutur sama dengan melakukan suatu tindakan yang dalam istilah pragmatik disebut ‘tindak tutur’. Tindakan yang dimaksud dapat berupa ‘menjelaskan’, ‘menyuruh’, ‘berjanji’, dan sebagainya. Dalam interaksi berkata-kata atau bercakap-cakap, yang umum disebut sebagai interaksi komunikasi, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berkata dan pihak yang mendengarkan. Pihak atau orang yang bertutur dapat disebut sebagai penutur (*speaker*) dan pihak atau orang yang mendengarkan dapat disebut sebagai mitra tutur (*hearer*). Interaksi komunikasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal seperti pidato presiden, debat presiden, presentasi dalam seminar, rapat pimpinan lembaga, dan sebagainya, sedangkan komunikasi informal seperti perbincangan santai di warung kopi, perbincangan anggota keluarga di rumah, perbincangan tuan rumah dan tamu, dan sebagainya.

Kajian ini membahas interaksi komunikasi formal dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2014. Ini merupakan peristiwa nasional yang penting sebagai perwujudan dari demokrasi di Indonesia. Interaksi komunikasi tersebut dapat diistilahkan dengan peristiwa tutur (*speech event*) yang di dalamnya terkandung banyak tindak tutur yang menarik untuk diteliti. Tindak

tutur yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak tutur berjanji (tindak tutur komisif) yang diproduksi oleh calon presiden dan wakil presiden 2014.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari dipilihnya tindak tutur berjanji untuk diteliti, yaitu (1) peristiwa tutur debat calon presiden dan wakil presiden cenderung diwarnai oleh janji-janji para calon untuk memikat hati calon pemilih sehingga tindak tutur berjanji dapat dipastikan ada dan memadai untuk diteliti. (2) Seperti diketahui bahwa berjanji merupakan tindak yang mengikat penutur untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan bersifat menguntungkan mitra tutur, sehingga secara tidak langsung penutur terikat kontrak dengan mitra tutur dan bahkan janji tersebut dapat dipandang sebagai ‘hutang’ yang suatu saat dapat ditagih oleh mitra tutur. Oleh karena itu, karakteristik tindak tutur janji ini menarik untuk diteliti khususnya terkait dengan variasinya pada masing-masing penutur yang berbeda latar belakang. (3) Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap referensi kajian tindak tutur, ditemukan bahwa kajian tindak tutur, seperti tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur representatif lebih banyak dilakukan dari pada tindak tutur berjanji. Hal ini merupakan rumpang (*gap*) antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. (4) Peneliti adalah mahasiswa yang mendalami bidang linguistik dan karenanya terdapat kesesuaian antara bidang yang didalami peneliti dengan kajian yaitu tentang tindak tutur berjanji.

1.2 Tinjauan Pustaka

Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan adanya rumpang (*gap*) dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Maria (2015), dalam tesisnya yang berjudul *The Structures of Argument in Indonesia Presidential Debates 2014*, mengkaji struktur argumen yang digunakan oleh Jokowi dan Prabowo dalam Debat Calon Presiden Indonesia tahun 2014. Teori yang digunakan adalah teori Toulmin (2003) tentang analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari debat pertama sampai terakhir kedua calon presiden membuat struktur argument yang bervariasi. Prabowo menunjukkan struktur argumen yang lebih baik pada tema “Politik Internasional dan Keamanan Nasional” dan “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Negara Hukum”, sedangkan Jokowi lebih unggul pada tema “Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” dan pada tema “Pangan, Energi, dan Lingkungan”.

Perbedaan tegas antara penelitian yang dilakukan Maria (2015) dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu tersebut dilakukan dalam perspektif analisis wacana kritis (AWK) sedangkan penelitian ini dilakukan dalam perspektif pragmatik. Di samping itu, penelitian terdahulu itu hanya mengkaji debat calon presiden, sedangkan penelitian ini mengkaji debat calon presiden dan calon wakil presiden mengenai tindak tutur berjanji yang dilakukan.

Sari (2014) mengkaji tentang Tindak Tutur Komisif dalam *Second US Presidential Debate*. Penelitian berfokus pada jenis tindak ilokusi komisif dan

cara penyampaian tindak tutur komisif oleh kandidat, yaitu Obama dan Ronney. Teori yang digunakan adalah teori tindak tutur Austin (1960). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 23 tuturan berjanji yang terbagi menjadi lima jenis sub-tindak tutur komisif, yaitu (a) 2 tuturan berkategori penawaran, (b) 4 tuturan berkategori kewajiban, (c) 6 tuturan berkategori penolakan, (d) 6 tuturan berkategori sumpah, dan (e) 5 tuturan berkategori ungkapan sukarela. Ditemukan juga bahwa semua tindak tutur komisif tersebut disampaikan secara tidak langsung.

Penelitian Sari (2014) tersebut di atas tidak membahas bentuk linguistik yang dilakukan oleh para kandidat sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu, penelitian terdahulu ini dilakukan pada objek penelitian berupa debat presiden Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan objek berupa debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia Indonesia tahun 2014. Adapun teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah teori tindak tutur Austin (1960) sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindak tutur Searle (1975).

Al-Bantany (2013) mengkaji tentang penggunaan tindak tutur komisif dan implikasi kesantunannya dalam debat calon gubernur Banten tahun 2011. Teori tindak tutur Searle (1975) dan teori kesantunan Brown & Levinson (1987) digunakan dalam kajian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak tutur komisif dilakukan melalui tiga jenis tindak ilokusi komisif, yaitu jaminan (*gurance*) sebesar 53,7%, berjanji (*promise*) sebesar 38,9%, dan penolakan

(*refusal*) sebesar 7,4%. Ditemukan juga bahwa, dalam hal kesantunan, semua kandidat berperilaku sama, yaitu tingkat kesantunannya dalam kategori ‘santun’.

Penelitian Al-Bantany (2013) hanya berfokus kategorisasi sub-tindak tutur komisif dan persentasenya. Penelitian terdahulu ini juga membahas tingkat kesantunan tindak tutur komisif. Sisi lain yang tidak dibahas oleh Al-Bantany adalah bentuk linguistik tindak tutur berjanji dan isi tindak tutur berjanji sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini. Objek kajian penelitian terdahulu ini adalah debat calon Gubernur Banten tahun 2011 sedangkan penelitian ini objeknya adalah debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014.

Loughery & Ewald (2013) meneliti tentang strategi retorika yang diterapkan oleh McCain dan Obama dalam debat presiden. Penelitian terdahulu ini berfokus pada teori fungsional dalam perspektif linguistik. Tiga strategi yang menjadi fokus kajian yaitu strategi pengakuan (*acclaims*), penyerangan (*attacks*), dan bertahan (*defense*). Ketiganya dijelaskan dengan teori fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MacCain lebih banyak melakukan serangan verbal (*verbal attacks*) dan bertahan sedangkan Obama lebih cenderung melakukan strategi pengakuan (*acclaims*) dan bertahan (*defense*).

Penelitian terdahulu Loughery & Ewald (2013) ini menggunakan teori fungsional dalam analisisnya sedangkan kajian ini menggunakan teori pragmatik (tindak tutur). Penelitian terdahulu ini tidak mengkaji objek debat dalam perspektif linguistik pragmatik tetapi dalam perspektif linguistik fungsional. Objek kajiannya adalah debat presiden Amerika Serikat yaitu MacCain dan

Obama sedangkan penelitian ini objeknya adalah debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini dapat dinyatakan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk linguistik tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh para calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014?
2. Bagaimana isi tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh para Calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Menjelaskan bentuk linguistik tindak tutur berjanji yang dilakukan oleh para calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014.
2. Menjelaskan isi tindak tutur berjanji yang dilakukan oleh para calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis seperti dijabarkan berikut ini.

1. Manfaat Teoretis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: a) sebagai materi untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pragmatik khususnya tindak tutur berjanji; b) sebagai referensi dalam pengembangan penelitian dan kajian di bidang pragmatik khususnya tindak tutur berjanji.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: a) sebagai referensi bagi para politisi dalam melakukan komunikasi politik khususnya dalam memproduksi tindak tutur berjanji; b) sebagai bahan yang dapat dijadikan acuan bagi politisi dalam debat politik khususnya dalam menyampaikan tindak tutur berjanji.

1.6 Ruang Lingkup

Peneliti hanya mengkaj tindak tutur berjanji dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia tahun 2014. Penelitian ini berpangkal pada kajian pragmatik bentuk linguistik dan isi janji yang dituturkan oleh para kandidat. Jangkauan penelitian mencakupi variasi dan perbedaan bentuk linguistik dan isi tuturan berjanji. Teori yang digunakan adalah teori tindak tutur Searle (1975) dan teori kondisi kelayakan tindak tutur berjanji yang dikembangkan oleh Mey (1993). Adapun data penelitian

berupa tuturan berjanji yang disampaikan oleh para calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014.



BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan beberapa konsep yang digunakan, diantaranya adalah konteks dalam pragmatik, tindak tutur, tindak tutur berjanji, tindak tutur berjanji dengan verba atau tanpa verba performatif, tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, dan debat sebagai bentuk wacana politik.

2.1 Konteks dalam Pragmatik

Perkembangan pragmatik sebagai cabang dari ilmu linguistik yang diakui relatif baru terasa semakin meluas dan dikenal banyak orang khususnya ahli bahasa. Kehadirannya sempat menggetarkan pemikiran dan penganut linguistik struktural yang sekian lama mengakar di kalangan para ahli dan pemerhati bahasa. Hal ini disebabkan bahwa pragmatik lebih fokus pada aspek penggunaan bahasa dan makna tuturan yang sangat ditentukan oleh konteks. Dengan kata lain, pragmatik lebih mementingkan interkasi makna dari pada bentuk. Dalam pragmatik bentuk tetap penting keberadaannya tetapi seperti apa suatu bentuk itu tidak penting karena konteks adalah penentu segalanya. Meskipun bentuk bahasa terlihat lengkap dan rapi tetapi digunakan tidak pada konteksnya, maka dalam perspektif pragmatik tuturan tersebut dapat membahayakan atau mengancam muka mitra tutur maupun penutur sendiri.

Pragmatik adalah bagian dari cabang ilmu linguistik. Pragmatik dapat dipahami sebagai studi tentang hubungan antara bentuk bahasa dan penggunaannya

(Yule, 1996:3). Pengguna yang dimaksud adalah penutur (*speaker*) yang memiliki maksud dalam menyampaikan tuturannya. Jadi pragmatik pada dasarnya studi tentang maksud penutur (*speaker's sense*). Untuk dapat memahami maksud penutur itu, diperlukan konteks yaitu semua hal yang melingkupi dan melekat pada saat tuturan tersebut diproduksi (Mey, 1993:45). Berdasarkan pemaparan ini jelas bahwa pragmatik adalah studi tentang maksud penutur yang didasarkan atas konteks.

Konteks merupakan aspek penting dalam pragmatik karena hanya dengan konteks yang teridentifikasi maksud tuturan dapat ditangkap. Konteks merupakan bagian penting pragmatik yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, merupakan lingkungan suatu tuturan dan penentu makna tuturan (Mey, 1993:40). Menurut Huang (2001:15) bahwa konteks dapat terbagi menjadi tiga yaitu konteks fisik (*physical context*), konteks interpersonal (*interpersonal context*), dan konteks pengetahuan latar (*background knowledge context*). Konteks fisik mengacu pada semua objek yang berbentuk fisik yang terkait, melekat, dan melingkupi tuturan, seperti tempat, alat, dan benda-benda lainnya yang terkait dengan peristiwa tutur. Konteks interpersonal mengacu pada latar belakang penutur, karakteristik personal penutur, dan hubungan personal penutur dengan mitra tutur, misalnya latar belakang pendidikan, profesi, hubungan akrab dan tidak akrab, hubungan atasan dan bawahan antara penutur dan mitra tutur. Konteks pengetahuan latar mengacu pada pengetahuan umum yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur, artinya penutur dan mitra tutur sudah sama-sama tahu tentang maksud ujaran tertentu yang digunakan oleh penutur, misalnya Prabowo

(calon presiden) mengatakan bahwa anggaran kita banyak yang ‘bocor’. Maksud penutur dengan kata ‘bocor’ dalam konteks tersebut juga sudah dipahami oleh mitra tutur, yaitu anggaran negara banyak disalahgunakan.

Konteks lainnya yang juga umum dikenal dalam pragmatik adalah konteks situasi (Mey, 1993:47). Konteks situasi adalah situasi yang ada sebelum atau selama tuturan disampaikan. Konteks ini merupakan lingkungan ketika tuturan itu disampaikan. Situasi yang dimaksud dapat berupa keadaan, kejadian-kejadian, dan lain-lain yang ada sebelum tuturan diproduksi atau terjadi selama tuturan diproduksi penutur. Oleh karena itu konteks situasi ini perlu diidentifikasi dan dideskripsikan untuk menangkap makna tuturan ketika data disajikan dalam penelitian.

2.2 Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan salah satu dari beberapa ranah utama kajian pragmatik. Seorang ahli filsafat bahasa berkebangsaan Austria bernama Austin mencetuskan teori tindak tutur tersebut pada tahun 1960. Teori tindak tutur versi Austin (1960) itu kemudian disempurnakan oleh muridnya berkebangsaan Amerika Serikat bernama John Searle pada tahun 1975. Dua tokoh inilah yang namanya sangat melekat dengan teori tindak tutur pada dewasa ini. Sebenarnya banyak para ahli bahasa yang mendalami dan melakukan kategorisasi tindak tutur setelah era Austin dan Searle, seperti Kreidler (1980), Gazdar (1983), dan lain-lain tetapi popularitas Austin dan Searle tetap tidak terkalahkan. Para ahli lain yang mengkaji tindak tutur itu tetap menempatkan teori Austin dan Searle sebagai

fondasi dan pijakan utama dalam analisis kajiannya. Jadi, Austin dan Searle memiliki hubungan guru-murid dan ide-ide Searle sebagian bersifat melengkapi ide-ide gurunya tentang tindak tutur, termasuk dalam hal kategorisasi tindak tutur, bahkan diakui bahwa kategorisasi tindak tutur versi Searle lebih populer dari pada versi gurunya karena kategorisasi versi Austin banyak menuai kritik sedangkan versi Searle tidak.

2.2.1 Definisi tindak tutur

Sebelum Austin (1962) menggagas teorinya yang terkenal yaitu tindak tutur (*speech act*), para filosof dan ahli bahasa berpegang teguh pada pemikiran bahwa orang mengatakan sesuatu itu hanya sebatas mengatakan saja, tidak lebih dari itu. Akan tetapi Austin (1962) dalam bukunya “*How to Do Things with Words*” mengeluarkan gagasan baru bahwa mengatakan sesuatu itu adalah melakukan suatu tindakan, dan lahirlah teorinya yang terkenal yaitu tindak tutur. Jadi tindak tutur dapat dipahami sebagai melakukan sesuatu dengan kata-kata atau mengatakan sesuatu itu adalah melakukan suatu tindakan. Tindakan dengan mengatakan sesuatu itu, menurut Austin (1962) mengandung tiga unsur tindak yang tidak terpisahkan yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi.

2.2.2 Tiga tindak yang dilakukan dalam bertindak tutur

Searle (1969: 23-24 dalam Huang, 2007:103-104) mengemukakan bahwa dalam ilmu pragmatik terdapat tiga jenis tindak yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).

1. Tindak Lokusi

Tindak lokusi merupakan tindak memproduksi ungkapan linguistik yang bermakna yang merupakan dasar suatu tuturan. Dengan kata lain bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu (*the act of saying something*).

2. Tindak Ilokusi.

Tindak ilokusi ini menunjukkan maksud penutur untuk melakukan tindakan tertentu dengan ungkapan linguistik yang bersifat konvensional baik secara eksplisit maupun implisit. Tindak ilokusi mengacu pada jenis fungsi yang dimaksudkan oleh penutur atau jenis tindak yang dimaksudkan oleh penutur dalam kaitannya dengan produksi tuturan. Tindak ilokusi ini terikat oleh konvensi sosial dan merupakan tindak yang dilakukan dalam mengatakan sesuatu. Tindak ilokusi dapat berupa, misalnya tindakan berterimakasih, tindakan meminta maaf, tindakan memarahi, tindakan memuji, tindakan berjanji. Tindakan yang terdapat dalam tindak ilokusi tersebut mengandung daya ilokusi (*illocutionary force*). Daya ilokusi yang ditunjukkan dalam fungsi atau tindakan tersebut oleh Searle (1969 dalam Huang, 2007:103) disebut *illocutionary force indicating device* (IFID), yaitu perangkat atau alat yang menunjukkan daya ilokusi. IFID yang dimaksud adalah verba performatif yang terdapat dalam tuturan yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. IFID tersebut dalam tuturan dapat bersifat eksplisit (dimunculkan atau dikatakan) atau bersifat implisit (tidak dimunculkan atau tidak dikatakan). Jadi, tindak

ilokusi selain berfungsi untuk mengatakan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu (*the act of doing something*).

3. Tindak Perlokusi.

Tindak ini adalah akibat atau konsekuensi terhadap mitra tutur melalui tuturan yang disampaikan penutur. Jadi, tindak ilokusi yang dilakukan oleh penutur dapat membawa akibat atau dampak terhadap mitra tuturnya berupa suatu tindakan yang dilakukan mitra tutur. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa akibat atau dampak yang mengenai mitra tutur dari tindakan yang dilakukan penutur dengan mengatakan sesuatu itu dikatakan tindak perlokusi. Jadi, tindak perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur (*the act of affecting someone*) atau efek yang timbul dari tuturan penutur.

2.2.3 Jenis Tindak Tutur

John Langsaw Austin (1962), linguis Inggris di dalam bukunya "*How to Do Things with Words*", mengemukakan pandangannya bahwa di dalam mengutarakan tuturan, seseorang dapat melakukan sesuatu selain mengatakan sesuatu. Contoh tuturan (1) s.d. (5) berikut mengandung makna tidak hanya mengatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu.

- (1) Saya mohon maaf atas keterlambatan saya.
- (2) Saya berjanji mulai hari ini akan mematuhi disiplin kantor.
- (3) Saya berani bertaruh bahwa kejahatan .pada akhirnya pasti kalah.
- (4) Saya umumkan bahwa harga BBM tidak akan dinaikkan.

(5) Dengan mengucap Bismillah, seminar ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Austin (1962) menggolongkan tindak tutur menjadi lima tipe, yaitu 1) **verdikatif** (membuat sebuah putusan); 2) **eksersitif** (menggunakan kekuasaan, hak, atau pengaruh); 3) **komisif** (berjanji); 4) **behabitif** (menunjukkan sikap dan perilaku sosial; dan 5) **ekspositif** (menyesuaikan ujaran terhadap percakapan).

Teori induk (*grand theory*) tentang tindak tutur yang digagas Austin (1962) tersebut lalu dikembangkan oleh muridnya yang bernama Searle (1975) yang menggolongkan tindak tutur menjadi lima sebagaimana yang dijelaskan oleh Huang (2007:106-108) seperti berikut.

(1) **Representatif**, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakan, artinya penutur mengungkapkan kebenaran sesuatu yang diyakini, misalnya: menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Dalam melakukan tindak tutur ini, penutur mewakili dunia yang dia yakini benar. Dia menjadikan tuturannya sesuai dengan dunia yang diyakininya.

Contoh:

- 1.a) Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia.
- 1.b) Para pejuang telah banyak berkorban jiwa raganya demi kemerdekaan.
- 1.c) Indonesia adalah Negara kepulauan.

(2) **Direktif**, ialah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar mitra tuturnya melakukan tindakan yang disebutkan dalam tuturan itu, misalnya: menyuruh, menuntut, menyarankan, memohon. Dalam melakukan tindak tutur ini, penutur berusaha membuat dunia sesuai dengan kata melalui mitra tutur.

Contoh:

- 2.a) Kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya
- 2.b) Jangan gunakan alat itu untuk merusak.
- 2.c) Maukah anda untuk tidak mengulangi perbuatan itu.

(3) **Ekspresif**, ialah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, misalnya: memuji, mengucapkan terimakasih, mengkritik, dan mengeluh. Dalam hal ini, penutur mengungkapkan sikap atau kondisi psikologisnya.

Contoh:

- 3.a) Bagus sekali memainkan bola, Bambang itu.
- 3.b) Saya begitu senang bertemu dengan si dia.
- 3.c) Wow, hebat sekali ya !

(4) **Komisif**, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam tuturannya. Ini mengungkapkan maksud penutur untuk melakukan sesuatu, misalnya: berjanji, bersumpah, atau mengancam.

Contoh:

- 4.a) Saya akan selesaikan studi saya dalam waktu tiga tahun.
- 4.b) Saya akan belikan dia cincin baru sebagai hadiah ulang tahun perkawinan saya.
- 4.c) Saya akan melihat hasil kerjaan anda minggu depan.

(5) **Deklarasi**, ialah tindak tutur yang dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan dan sebagainya). Dalam melakukan tindak tutur ini, penutur membuat perubahan dalam dunia, yaitu dia menciptakan kesesuaian antara isi tuturan dan dunia. Aspek paradigmatisnya meliputi pengumuman perang, pemecatan pekerja, nominasi calon, dan sejenisnya.

Contoh:

- 5.a) Saya naikkan harga BBM dua persen mulai senin depan.
- 5.b) Pertemuan ini dibatalkan karena ada keperluan mendadak.
- 5.c) Kami tidak menemukan bukti kalau pemain belakang itu melakukan kesalahan.

Penelitian hanya membahas tindak tutur berjanji dan berikut dijabarkan konsep tindak berjanji yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

2.3 Tindak Tutur Berjanji

2.3.1 Definisi Berjanji

Tindak berjanji merupakan tindak yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu untuk mitra tuturnya yang bersifat prospektif, yang berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan pada masa yang akan datang (Mey, 2001:120). Dalam penggunaan bahasa, satu tuturan dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam tindakan termasuk tindakan berjanji. Seperti pada contoh berikut ini yang dapat memiliki tindak ancaman atau berjanji tergantung pada konteks tuturan.

‘Saya akan datang lagi dan akan melihat perkembangan kamu minggu depan.’

Tuturan tersebut dapat mengandung: (1) tindak tutur mengancam apabila dituturkan dalam konteks di mana penutur (seorang pimpinan) sudah berulang kali mengingatkan dan memperingatkan mitra tutur (seorang karyawan) yang tetap saja melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pekerjaan yang terancam sanksi penurunan jabatan atau pemberhentian sehingga penutur mengancam hendak menjatuhkan sanksi itu apabila dalam satu minggu mitra tutur tidak melakukan perubahan. (2) Tindak tutur berjanji apabila dituturkan dalam konteks di mana penutur (dokter) sudah memeriksa keadaan mitra tutur (pasien) yang dirawat inap dan kemudian penutur berjanji akan datang lagi dan memeriksanya

minggu depan. Jadi jelas terlihat bahwa kontekslah yang menentukan apakah itu mengandung tindak tutur berjanji atau tidak.

2.3.2 Kondisi Berjanji

Menurut Mey (2001:99) bahwa dalam tindak berjanji terdapat dua hal yang dirasa penting untuk diperhatikan, yaitu kondisi berjanji dan kaidah berjanji dalam penggunaan IFID. Kondisi berjanji yaitu syarat suatu tuturan untuk dapat dikategorikan mengandung maksud berjanji. Kaidah berjanji adalah aturan yang mengikat dalam penggunaan IFID dalam tindak tutur berjanji. Menurut Searle (1975) dalam Mey (2001:99-100) bahwa terdapat sembilan kondisi yang dapat mendukung keberhasilan tindak berjanji seperti dijabarkan berikut.

- (1) Penutur dalam kondisi normal baik fisik maupun psikis ketika memproduksi tuturan berjanji, artinya penutur tidak mengalami hambatan fisik dan/atau mental yang diakui sebagai hambatan potensial dalam komunikasi, misalnya tuli (tuna rungu), hilang ingatan, mabuk, dan/atau gila. Juga penutur bebas dari penggunaan bahasa parasitik (*parasitic use of language*) seperti bergurau/bercanda, dan perilaku yang didramatisir.
- (2) Janji harus mengandung isi, seperti ‘saya akan belikan kamu celana baru besok’ mengandung isi ‘membeli celana besok’.
- (3) Janji harus bersifat prospektif.

- (4) Secara jelas apa yang dijanjikan memberikan keuntungan bagi yang menerima janji, dan harus jelas apakah itu janji atau ancaman.
- (5) Isi janji dapat dipenuhi dalam waktu yang jelas.
- (6) Janji dilakukan secara tulus, artinya tanpa adanya tekanan.
- (7) Penutur sadar bahwa janjinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
- (8) Bahasa yang digunakan dalam berjanji harus bahasa yang normal yang mengacu pada kaidah semantik.
- (9) Terdapat konvensi normal dari bahasa yang digunakan, dengan kata lain itu harus benar secara pragmatik.

2.3.2 **IFID (*Illocutionary Force Indicating Device*)**

IFID dipahami sebagai peranti untuk mengidentifikasi tindak tutur. Peranti yang dimaksud dalam IFID adalah verba performatif yang digunakan penutur dalam melakukan suatu tindakan (Searle, 1975). Menurut Mey (2001:101), tindak tutur berjanji, seperti halnya jenis tindak tutur lainnya, juga memiliki karakteristik umum yang menandai tindak tutur berjanji tersebut yang dikenal dengan istilah IFIDs (*illocutionary force identifying devices*). Berikut ini dijabarkan lima kaidah dalam penggunaan IFIDs berjanji yang dirangkum dari Mey (2001:101).

Kaidah 1, IFIDs berjanji hanya digunakan ketika isi tuturan mengenai sesuatu tindakan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Kaidah 2, IFIDs berjanji hanya digunakan ketika janji itu berisi hanya ditujukan kepada pihak yang diberi janji.

Kaidah 3, IFIDs berjanji hanya digunakan untuk janji yang isinya tidak berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadual, justifikasi diri atau sesuatu yang terjadi secara alami.

Kaidah 4, IFIDs berjanji hanya digunakan untuk janji yang tulus.

Kaidah 5, IFIDs berjanji hanya digunakan untuk janji yang dilakukan sebagai bentuk kewajiban pembuat janji terhadap pihak yang menerima janji.

2.4 Tindak Tutur Berjanji dengan Verba atau tanpa Verba Performatif

Tindak tutur berjanji seperti halnya tindak tutur lainnya dapat dilakukan dengan menyebutkan verbanya secara eksplisit seperti kata ‘berjanji’ sehingga dapat mempertegas tindak tutur tersebut bahwa tindak ilokusi yang ditangkap adalah jelas berjanji. Akan tetapi tindak tutur berjanji juga dapat dilakukan dengan cara tidak menyebutkan verbanya, artinya penutur secara langsung menyatakan isi janjinya mengenai sesuatu yang akan dilakukan untuk pihak yang menerima janji, seperti ‘saya akan datang besok pagi’ (Mey, 2001:106-110)

Dalam perspektif pragmatik, unsur penentu bagi suatu tuturan apakah itu janji atau tidak adalah konteks yang melingkupi tuturan-tuturan itu saat diproduksi. Dengan konteks yang teridentifikasi, tuturan berjanji meskipun tanpa verba performatif dapat diketahui dan dipahami oleh mitra tutur. Verba yang digunakan dalam berjanji memang harus mengacu pada *property* semantik

sehingga makna verba berjanji menjadi jelas dan tidak mengundang salah interpretasi. Hanya isi janjilah yang sangat tergantung pada konteks tuturan yang merupakan unsur penting dalam menangkap makna tuturan tersebut.

2.5 Tindak Tutur Langsung dan Tindak Tutur Tidak Langsung

Pada umumnya penggunaan tindak tutur tidak langsung berhubungan dengan kesantunan. Tindak tutur tidak langsung diakui lebih santun dari pada tindak tutur langsung. Jadi, semakin tidak langsung sebuah tuturan, maka semakin santun tuturan tersebut bila dibandingkan dengan tuturan langsung. Seperti ditegaskan bahwa kesantunan merupakan aspek yang sangat melekat pada tindak tutur tidak langsung (Huang, 2007:109-111). Berikut dijelaskan isu-isu kesantunan dari beberapa ahli.

Terdapat empat model teori tentang kesantunan, yaitu (1) model norma sosial (*the social norm model*); (2) model maksim percakapan (*the conversational maxim model*) (Leech, 1983); (3) model penyelamatan muka (*the face-saving model*) (Brown and Levinson, 1987); dan (4) model kontrak percakapan (*the conversational contract model*) (Fraser, 1990). Dari keempat model tersebut, model dari Brown dan Levinson yang paling terkenal.

Teori kesantunan dari Brown dan Levinson adalah teori muka (*face*) yang merupakan aspek penting dalam pragmatik. Istilah muka mengacu pada pandangan E. Goffman (1967) tentang segala keinginan yang ada pada manusia. Setiap diri orang memiliki dua muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk dihargai, dan muka negatif adalah keinginan untuk tidak direndahkan. Berkaitan dengan pengaturan muka ini, teori kesantunan

mengarahkan agar dalam berinteraksi verbal, penutur senantiasa menjaga muka mitra tutur dan muka penutur sendiri. Teori kesantunan ini dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987:75-99) yang membagi strategi kesantunan menjadi strategi kesantunan positif dan strategi kesantunan negatif, yang masing-masing mengacu pada muka positif dan muka negatif.

Setiap tindak tutur seperti komplain (*complaints*), ketidaksetujuan (*disagreements*), dan permintaan (*requests*) berpotensi mengancam atau bahkan merusak muka interpersonal, yaitu muka mitra tutur dan muka penutur, dan itu disebut tuturan pengancam muka (*face-threatening acts* atau FTA). Oleh karena itu, dalam bertutur kata, penutur dapat menjaga muka mitra tutur dengan tuturan penyelamat muka (*face-saving acts* atau FSA).

Brown dan Levinson (1987:99) mengajukan tiga variabel sosial yang dapat dipakai mengukur tingkat FTA, yaitu (1) jarak sosial (*social distance* = D) antara penutur dan mitra tutur; (2) kekuasaan relatif (*relative power* = P) dari mitra tutur atas penutur; dan tingkatan mutlak (*absolute ranking* = R) imposisi dalam budaya tertentu. Kekuatan FTA diukur dengan penggabungan ketiga variabel tersebut.

2.6 Debat Presiden Sebagai Bentuk Wacana Politik

Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia tahun 2014 merupakan peristiwa demokrasi nasional yang terjadi dalam pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Debat tersebut dikategorikan sebagai bentuk wacana politik karena topik-topik yang dibahas terkait dengan pemerintahan, kenegaraan, dan kekuasaan (Sulis, 2009:1-

9). Debat ini juga merupakan bagian dari agenda pemilihan umum untuk memilih kepala negara. Adapun topik-topik dalam ini mencakupi pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum; pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial; politik internasional dan ketahanan nasional; pembangunan SDM dan IPTEK; ketahanan pangan, energi, dan lingkungan.

Wacana pada hakekatnya merupakan rangkaian kalimat yang serasi, yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lain, kalimat satu dengan kalimat lain, yang membentuk satu kesatuan. Dalam perspektif linguistik, wacana mengacu pada suatu kesatuan bahasa yang lengkap, umumnya lebih besar dari pada kalimat, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Dalam dunia politik, wacana merupakan salah satu media yang dipandang sesuai untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas sehingga diharapkan tidak muncul beragam interpretasi dan multitafsir di tengah-tengah masyarakat (Sulis, 2009:1-9). Kajian-kajian tentang wacana beserta aspek-aspeknya sangat beragam di mana wacana sudah merambah berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling terkait satu sama lain.

Wacana yang berhubungan dengan topik-topik politik disebut sebagai wacana politik. Pengertian wacana politik dijelaskan oleh Chilton (2004:201) bahwa wacana politik dapat dipahami sebagai penggunaan bahasa di mana pengguna bahasa tersebut menggunakan kata-kata tertentu atau struktur tertentu guna menciptakan perilaku politik tertentu. Ini jelas bahwa wacana politik berbentuk bahasa yang digunakan untuk maksud politik. Oleh karenanya, kata-kata dan struktur yang digunakan bersifat kusus, yaitu kata-kata yang lazim digunakan

atau kata-kata yang dapat diterima oleh penutur dengan harapan maksud dan tujuan penutur dapat tercapai.

Wacana politik memiliki beberapa bentuk di antaranya adalah kampanye terbuka, debat presiden, dialog politik dalam media cetak maupun elektronik, iklan dalam spanduk dan banner, iklan dalam media elektronik. Dalam dunia politik, termasuk dalam debat politik peranan bahasa sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik dalam debat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks sosial, politik, dan kultural, bahasa digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna. Panggabean (dalam Santoso, 2003:4) mengatakan tokoh-tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena di balik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi.

Bahasa politik merupakan bahasa yang dipergunakan para elit politik dan elit birokrasi untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan. Bahasa politik semacam ini juga dipergunakan dalam debat politik seperti dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden. Bahasa politik memiliki karakteristik, yaitu 1) terjadinya politisasi makna atas bahasa-bahasa yang dipergunakannya; 2) terjadi penghalusan makna seperti dalam penggunaan pagar (*hedge*), modalitas, bentuk kondisional, dan bentuk *eufimisme* bahasa yang disebut oleh Mochtar Lubis

(dalam Sulistyaningtyas, 2009:1-9) sebagai sebuah penyempitan makna, dan 3) terjadinya bentuk-bentuk bahasa propaganda dalam rangka meyakinkan pihak lain, terutama masyarakat (Santoso, 2003 dalam Sulistyaningtyas, 2009:1-9). Tuturan berjanji dalam wacana debat calon presiden dan wakil presiden 2014 ini sebagai bahasa politik memiliki karakteristik penghalusan makna dalam bentuk tuturan (ujaran) kondisional dan penggunaan modalitas ‘akan’, ‘ingin’ dan ‘harus’.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam tentang perilaku penutur dalam berkomunikasi pada peristiwa tutur Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia tahun 2014. Fokus kajian lebih ditujukan pada interpretasi tindak tutur berjanji yang dilakukan penutur termasuk cara-cara mereka melakukan tindak tutur berjanji. Kajian juga mencakupi identifikasi konteks tuturan untuk mendapatkan interpretasi yang sesuai mengenai apa yang dimaksudkan oleh penutur. Latar alamiah peristiwa tutur Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut diasumsikan terpenuhi selama debat berlangsung karena latar alamiah merupakan syarat penting dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan latar alamiah di sini adalah tempat mereka melakukan debat yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun TV tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun.

Terdapat beberapa alasan mengapa jenis penelitian kualitatif ini dipilih, yaitu (1) data penelitian yang berupa tuturan berjanji memiliki kesesuaian dengan jenis penelitian kualitas sehingga data tersebut lebih layak untuk dikaji secara kualitatif; (2) penelitian kualitatif mampu menjelaskan secara detail dan mendalam tentang fenomena yang secara alamiah tidak dapat

dijangkau oleh jenis penelitian kuantitatif, misalnya fenomena "sangat berbeda" hanya dapat dijelaskan seperti apa perbedaannya melalui penjelasan naratif (kualitatif) bukan dinyatakan dengan angka (kuantitatif).

3.2 Data dan Sumber Data

Data penelitian ini berwujud tuturan berjanji yang disampaikan oleh para calon dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014. Data tersebut dikumpulkan dari sumber utama yang meliputi: (1) Peristiwa tutur, yaitu proses komunikasi dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014 yang di siarkan langsung oleh TVRI, RCTI, SCTV, TVONE, METRO TV, dan INDOSIAR; dan (2) dokumen, yaitu rekaman audio-video tentang Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014 yang diunduh dari internet dan dokumen berupa catatan-catatan mengenai semua partisipan dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia tahun 2014.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu 'pengamatan', dilakukan terhadap berlangsungnya komunikasi debat melalui audio-video yang diunduh dari internet. Debat yang disiarkan langsung oleh stasiun TV tersebut diunggah di internet sehingga peneliti dapat mengunduhnya. Bentuk pengamatan yang dilakukan peneliti adalah pengamatan pasif, artinya peneliti tidak berperan aktif, hanya sebatas mengamati berlangsungnya debat di audio-video (Spradley, 1980:75).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang digagas oleh Miles dan Huberman (1984:88). Menurut ilmuwan ini, teknik analisis data mencakupi beberapa langkah, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah memilah antara data yang dibutuhkan dengan data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini disebabkan bahwa tidak semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dibutuhkan untuk dianalisis sesuai dengan masalah-masalah yang dirumuskan. Data dalam bentuk rekaman audio-video ditranskripsikan kemudian direduksi dengan cara memilah percakapan yang mengandung tindak tutur berjanji saja, sedangkan percakapan yang tidak mengandung tindak tutur berjanji disisihkan tetapi tetap disimpan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mendukung interpretasi selama proses analisis berlangsung. Cara seperti ini dapat membuat peneliti mampu melakukan identifikasi dan pemilihan data secara fokus sesuai dengan masalah yang dikaji.

Kategorisasi tuturan, apakah itu tuturan berjanji atau tidak, didasarkan pada konteks tuturan, kondisi kelayakan tindak tutur berjanji, dan kaidah berjanji. Konteks tuturan yang dimaksud adalah konteks linguistik, konteks fisik, konteks pengetahuan umum (interpersonal) (Huang, 2007:17), dan konteks situasi (Mey, 2001:47). Konteks linguistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konteks kebahasaan yang terkait dengan struktur gramatikal, kalimat-kalimat yang berada sebelum dan/atau sesudah tuturan berjanji. Konteks fisik berupa tempat debat dan

peralatan yang digunakan, dan konteks pengetahuan umum (interpersonal) berupa pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur tentang topik-topik debat. Konteks situasi berupa waktu dan situasi yang melingkupi tuturan terkait apa yang dibicarakan, saat apa berbicara, status penutur, maksud dan tujuan penutur.

Langkah kedua adalah penyajian data. Data penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk transkrip teks percakapan yang disertai dengan deskripsi dan eksplanasi yang mencakupi apa, bagaimana, dan mengapa fenomena yang melekat pada tindak tutur berjanji itu terjadi. Deskripsi konteks tuturan juga disajikan sebagai penentu makna tuturan yang mencakupi (1) deskripsi peserta tutur, (2) deskripsi hubungan peserta tutur, (3) deskripsi tingkat hubungan antar peserta tutur, dan (4) deskripsi situasi. Deskripsi peserta tutur, deskripsi hubungan peserta tutur dan tingkat hubungannya disajikan sebagai konteks umum dan deskripsi situasi sebagai deskripsi yang disajikan berbeda pada setiap tuturan.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan interpretasi-interpretasi pada catatan hasil pengamatan dan transkrip percakapan guna memperoleh kesimpulan awal yang didasarkan atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan awal yang dibuat selalu dicek silang (*cross-check*) dengan transkrip percakapan dan konteks tuturan untuk mendapatkan pemantapan kesimpulan yang nantinya benar-benar mampu mendukung pada penarikan kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu 1) Bentuk linguistik tindak tutur berjanji yang disampaikan para kandidat (4.1), 2) Isi tuturan berjanji yang diungkapkan oleh Para Kandidat (4.2).

Berikut dijelaskan konteks umum yang terkait dengan peristiwa tutur Debat Capres-Cawapres di Indonesia tahun 2014. Penjelasan ini dimaksudkan untuk dapat mendukung peneliti dalam membahas tuturan berjanji yang diungkapkan oleh para kandidat.

| | |
|---|---|
| Peristiwa Tutur (<i>speech event</i>) | : Debat Capres-Cawapres 2014 |
| Tempat | : Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. |
| Disiarkan langsung oleh | : TVRI, RCTI, SCTV, TVONE, METRO TV, dan INDOSIAR. |
| Waktu | : Juni-Juli 2014, pukul 18.30-22.00 wib. |
| Peserta tutur | : Prabowo Subianto (PS), Hatta Rajasa (HR), Joko Widodo (JW), Jusuf Kalla (JK), dan Moderator (MD). |
| Hubungan Penutur-Mitra Tutur | : Atas-Bawah Tidak Akrab (<i>Not Close Superior-Subordinate</i>) |

PS adalah Calon presiden 2014 (Pasangan Kandidat No. Urut 1), purnawirawan TNI berpangkat terakhir Jenderal, mantan komandan Kopassus TNI pada Era Orde Baru Pemerintahan Soeharto dan PS juga sebagai praktisi politik dan menjabat Ketua Umum Partai GERINDRA. HR adalah Calon wakil presiden 2014 (Pasangan Kandidat No. Urut 1), mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet II Pemerintahan SBY. HR sebagai praktisi politik dan menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

JW adalah Calon presiden 2014 (Pasangan Kandidat No. Urut 2), pengusaha mebel dan Beliau merupakan Mantan Walikota Surakarta (Solo) selama dua kali masa bakti 2005-2015. Ketika itu, beliau dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tahun 2012 beliau menjadi Gubernur di Jakarta. JK adalah Calon wakil presiden 2014 (Pasangan Kandidat No. Urut 2), pengalamannya di bidang pemerintahan pernah menjabat sebagai mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 2004–2009 beliau menjadi Wakil Presiden RI.

Adapun moderator yang pertama, Dr. Zainal Arifin Mochtar S.H.LLM, ketua pusat kajian anti korupsi dan pengajar ilmu hukum Universitas Gajah Mada, menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada dan North Fasition University Amerika serikat. Kedua, Prof. Dr. Ahmad Eraniustika, Guru besar Ilmu Ekonomi dikelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan Direktur Eksekutif Institut for Development Economic and Finness atau Indepe. Ketiga, Prof. Hikmah Hanto Juana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini merampungkan studi pasca sarjana di program Magister (S-2) di bidang Hukum Internasional di Keio University, Jepang dan Doktor (S-3) di University of Nottingham, Inggris. Keempat, Prof. Ir. Dwi Corita Karnawati, M.Sc, Ph.D merupakan Akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, beliau merupakan Wakil Rektor UGM, meraih gelar S1 dari UGM, S2 dan S3 dari Leeds University, United Kingdom. Kelima, Prof. Sudharto P Hadi . M.ES. Ph.D Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang S1 di Fisip UNDIP dan dilanjutkan S2 pada York University, Toronto, Canada serta S3 pada University of British Columbia Vancouver, Canada.

4.1 Bentuk Linguistik Tindak Tutur Berjanji yang Disampaikan para Kandidat

Tindak tutur berjanji yang disampaikan oleh para kandidat memiliki beberapa bentuk linguistik yang bervariasi, di antaranya adalah 1) tindak tutur berjanji yang disampaikan dengan struktur kalimat kondisional, 2) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘ingin’, 3) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘harus’, 4) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘akan’, 5) tindak tutur berjanji dengan subjek kata ‘kami’ dan ‘kita’, 6) tindak tutur berjanji yang disampaikan dengan IFID berjanji secara implisit.

4.1.1 Tindak Tutur Berjanji yang Disampaikan dengan Struktur Kalimat

Kondisional

Para kandidat menyampaikan tindak tutur berjanji dalam debat dengan struktur kalimat kondisional. Berikut ini tuturan berjanji berstruktur kalimat kondisional dari semua kandidat.

- [1] *Kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras, yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, menyelamatkan kekayaan itu sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti, demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi rakyat kita, bukan demokrasi “wani piro”, bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif. (P. 33) / L. (PS)*
- [4] *Apabila diberi amanat oleh rakyat maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam penggunaan lahan dan sebagainya. (P. 27) / L. (HR)*
- [10] *Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan alokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. (p.11) (PS)*
- [11] *Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L (HR)*
- [14] *E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak on-line, IMB on-line, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita lakukan dan bisa dinasionalkan, semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah untuk megang pemerintahan ini. (P. 05) / L (JW)*

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa PS dan HR masing-masing menyampaikan dua tuturan berjanji dengan struktur kalimat kondisional, sedangkan JW hanya satu tuturan. Wujud tuturan kondisionalnya juga bervariasi

bagi masing-masing penutur, seperti PS menggunakan bentuk yang berbeda, yaitu ‘apabila menerima mandat dari rakyat’ [10] dan ‘manakala saya menerima mandat dari rakyat’, sedangkan HR menggunakan bentuk tuturan kondisional yang juga berbeda, yaitu ‘apabila diberi amanat oleh rakyat’ dan seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat’. JW menggunakan bentuk tuturan kondisional yang berbeda pula yaitu ‘apabila Jokowi dan JK diberi amanat untuk memegang pemerintahan ini’ Semua tuturan kondisional ini memiliki makna yang sama meskipun berbeda wujud atau bentuk.

Dalam perspektif pragmatik tuturan kondisional digunakan memiliki tujuan untuk memperlunak tuturan (berjanji). Tuturan [10] berikut ini mengandung klausa kondisional yang berfungsi memperlunak tuturan.

[10] *Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan alokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.* (PS)

Tuturan [10] terasa lebih lunak dari pada tuturan tersebut tanpa klausa kondisional sehingga tidak terkesan arogan atau kasar. Hal yang sama juga berlaku untuk tuturan lainnya, yaitu tuturan [1], [4], [11], dan [14] di atas.

4.1.2 Tindak Tutur Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘ingin’.

Para kandidat seperti PS dan JW menggunakan modalitas kata ‘ingin’ dalam menyampaikan tindak tutur berjanjinya. Kata ‘ingin’, berdasarkan konteks tuturan, berfungsi untuk menunjukkan kemauan, semangat dan antusiasme penutur untuk melakukan tindak yang terkandung dalam isi janjinya. Kata ‘ingin’ tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut akan dilakukan pada masa

yang akan datang. Posisi kata ‘ingin’ dalam struktur kalimat biasanya berada sebelum kata kerja (verba) seperti pada tuturan [2] dan [12] di bawah. Akan tetapi pada situasi tertentu kata ‘ingin’ menempati pada posisi sebelum subjek kalimat yang dimaksudkan untuk penekanan kata sebagaimana yang dituturkan oleh JW pada tuturan [16]. Hal itu dikarenakan bahwa ciri penekanan kata ‘ingin’ dalam penggunaan bahasa pada umumnya diungkapkan lebih awal.

[2] *Kami **ingin** menutupi bersama kebocoran. (P.11) / L. (PS)*

[12] *Kami **ingin** membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L. (JW)*

[16] *Pembangunan yang seperti apa yang **ingin** kita lakukan, pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritime serta industrinya dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa dan infrastruktur. (P. 3) / TL (JW)*

Apabila dibandingkan antara tuturan yang mengandung modalitas kata ‘ingin’ dengan yang tanpa kata ‘ingin’ akan memiliki makna yang berbeda dalam tindak tutur berjanji seperti pada tuturan [12]a dan [12]b.

[12]a: *Kami **ingin** membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L. (JW)*

[12]b: *Kami membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L. (JW)*

Tuturan [12]a lebih menunjukkan aspek kemauan dengan kata ‘ingin’ sedangkan tuturan [12]b tidak menunjukkan secara eksplisit adanya kemauan, semangat dan antusiasme. Hal ini jelas berbeda pula intensitas ‘keinginan’ penutur apabila kata ‘ingin’ diposisikan sebelum subjek kalimat seperti yang dituturkan

oleh JW pada tuturan [16] di atas. Karena aspek penekanan kata ‘ingin’ dalam penggunaan bahasa diucapkan lebih awal dengan tekanan suara.

4.1.3 Tindak Tutur Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘harus’.

- [5] *Penegak-penegak hukum **harus** ditingkatkan kemampuan manejerial, kemampuan teknisnya. (P.11)/L. (PS)*
- [8] ***Harus** kita perkuat koperasi, **harus** kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita **harus** mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL (PS).*
- [13] *Bangsa ini **harus** bersatu. Bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu, kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser pada keyakinan itu. (P. 17) / L (JK)*
- [20] *Jokowi-JK dalam kesempatan ini menyampaikan, pertama, soal pangan, soal pangan itu bagaimanapun kita **harus** tingkatkan produktifitasnya dengan cara penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat waktu dan perbaikan pengairan yang besar-besaran, kita **harus** jalankan itu dengan sistem yang ada bukan hanya beras, gula seperti itu, sawit seperti itu, dan lain-lainnya kebutuhan pokok lainnya. (P. 5-6) / L (JW)*

Para kandidat menggunakan modalitas kata ‘harus’ dalam melakukan tindak berjanji seperti PS, JK dan JW. Kata ‘harus’ mengacu pada ‘obligitas’ (kewajiban) yang mengikat penutur untuk melakukan sesuatu. Sebagai modalitas dalam satuan lingual, kata ‘harus’ menduduki posisi sebelum kata kerja (verba) atau sebelum subjek kalimat dalam penggunaan bahasa. Posisi kata ‘harus’ sebelum subjek menunjukkan adanya ‘penekanan’ kata oleh penutur, seperti yang dituturkan oleh PS pada tuturan [8].

Apabila dibandingkan antara tuturan yang mengandung kata ‘harus’ dengan yang tidak, maka akan memberikan makna yang berbeda sebagaimana

pada tuturan [8]a dan [8]b di bawah ini. Tuturan [8]a lebih menunjukkan adanya kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi atau menunjukkan tidak adanya pilihan lain sedangkan tuturan [8]b tidak menunjukkan seperti pada tuturan [8]a melainkan hanya tuturan janji tanpa pemarkah yang menunjukkan makna yang benar-benar mengikat penutur untuk melakukannya. Di samping itu, tuturan [8]a menunjukkan bahwa isi janji dalam tuturan itu benar-benar penting untuk diwujudkan.

[8]a: **Harus** kita perkuat koperasi, **harus** kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita **harus** mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL (PS).

[8]b: Kita perkuat koperasi, kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL (PS).

4.1.4 Tindak Tutur Berjanji yang Mengandung Modalitas Kata ‘akan’.

Tuturan berjanji yang mengandung modalitas kata ‘akan’ tergolong lebih dominan disampaikan oleh para kandidat. Sebagai modalitas dalam satuan lingual, kata ‘akan’ menduduki posisi sebelum kata kerja (verba) dalam struktur kalimat atau sebelum subjek. Posisi kata ‘akan’ sebelum subjek kalimat biasanya terjadi dalam penggunaan bahasa lisan atau dalam konteks informal. Modalitas kata ‘akan’ dalam tindak tutur berjanji berikut ini sebagian besar menduduki posisi sebelum verba kalimat, hanya dua tuturan yang disampaikan oleh JW seperti tuturan [18] dan [19] di mana kata ‘akan’ menduduki posisi sebelum subjek kalimat. Hal ini juga dimaksudkan untuk penekanan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilakukan nanti pada masa yang akan datang.

- [1] *Kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras,.....*
- [3] *Kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun. (P.11) / L (PS)*
- [4] *Apabila diberi amanat oleh rakyat maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini..... (P.27) / L (HR)*
- [6] *Pemerintahan Prabowo-Hatta memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L.*
- [9] *Kami akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami. (PS)*
- [10] *Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan alokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. (PS)*
- [11] *Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L (PS)*
- [15] *Kami akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. (P. 33) / L (JW)*
- [18] *Saya sampaikan akan kita berikan yang namanya kartu Indonesia pintar seperti ini untuk masyarakat anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu, akan kita berikan ini. (P. 8) / L (JW)*
- [19] *Yang kedua juga akan kita berikan kartu Indonesia sehat seperti ini yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. (JW)*

Kata ‘akan’ dalam tindak tutur berjanji berkedudukan sebagai pemarkah lingual yang menunjukkan waktu yang akan datang. Akan tetapi ia bukanlah penentu makna bahwa tindak tutur tersebut berkategori janji atau tidak. Jadi, kehadiran dan ketidakhadiran kata ‘akan’ dalam tindak tutur berjanji tidak

merubah kedudukan tuturan berjanji. Sehubungan dengan ini dapat dibandingkan tuturan berjanji berikut ini yang mengandung kata ‘akan’ dan yang tidak mengandung kata ‘akan’.

[9]a: *Kami akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami.* (PS)

[9]b: *Kami naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami.* (PS)

Tuturan [9]a dan [9]b adalah sama sebagai tindak tutur berjanji, hanya saja tuturan [9]a mengandung modalitas kata ‘akan’ yang dinyatakan secara eksplisit, sedangkan tuturan [9]b tidak mengandung modalitas kata ‘akan’, tetapi secara implisit tuturan [9]b mengandung makna ‘akan’ sebagai tindak tutur berjanji. Jadi, modalitas kata ‘akan’ sebagai satuan lingual dalam tindak tutur berjanji dapat dinyatakan secara eksplisit oleh penutur dan sebagai ‘makna prospektif’, ia tetap ada secara implisit karena tindak tutur berjanji itu memiliki keterkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

4.1.5 Tindak Tutur Berjanji dengan Subjek Kata ‘kami’ dan ‘kita’.

Kata ‘kami’ dalam perspektif pragmatik berfungsi sebagai deiksis persona yang mengacu pada orang pertama jamak, sedangkan kata ‘kita’ berfungsi sebagai deiksis persona yang mengacu pada orang pertama dan kedua. Akan tetapi dalam situasi tertentu, kata ‘kami’ dan ‘kita’ difungsikan sebagai strategi kesantunan, yaitu berfungsi sebagai peranti pelunak tuturan.

Para kandidat dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2014 pada umumnya menggunakan kata ‘kami’ dalam tuturan janjinya seperti pada beberapa tuturan berikut.

- [1] **Kami** Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat **kami** akan berkerja keras.... (PS)
- [2] **Kami** ingin menutupi bersama kebocoran. (P.11) / L. (PS)
- [7] **Kami** mendukung investasi asing tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. (PS)
- [9] **Kami** akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami. (PS)
- [4] Apabila diberi amanat oleh rakyat maka **kami** akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini.... (HR)
- [11] Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat **kami** merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L (HR)
- [12] **Kami** ingin membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L. (JW)
- [15] **Kami** akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. (P. 33) / L
- [13] Bangsa ini harus bersatu. Bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. **Kami** percaya itu, **kami** laksanakan itu. Percayalah bahwa **kami** tidak pernah bergeser pada keyakinan itu. (P. 17) / L

Tuturan tersebut di atas mengandung kata ‘kami’ sebagai subjek kalimat berkedudukan sebagai deiksis persona yang mengacu pada orang pertama jamak yaitu penutur sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kata ‘kami’ ini

digunakan oleh penutur karena penutur ketika berbicara berkedudukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden bersama pasangannya sehingga kata ‘kami’ dalam tuturannya dimaksudkan sebagai kata ganti dirinya (penutur) dan pasangannya.

Di samping kata ‘kami’, para kandidat juga menggunakan kata ‘kita’ dalam tuturan janjinya seperti dalam tuturan berikut ini.

- [3] ***Kita** tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun. (P.11) / L (PS)*
- [8] *Harus **kita** perkuat koperasi, harus **kita** perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu **kita** harus mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL (PS)*
- [18] *Saya sampaikan akan **kita** berikan yang namanya kartu Indonesia pintar seperti ini untuk masyarakat anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu, akan **kita** berikan ini. (P. 8) / L (JW)*
- [19] *Yang kedua juga akan **kita** berikan kartu Indonesia sehat seperti ini yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. (JW)*

Kata ‘kita’ dalam tuturan [3] tersebut di atas dimaksudkan oleh penutur yaitu penutur sendiri dan anggota partai pendukung penutur (PS) dalam pencalonannya sebagai calon presiden. Tuturan tersebut diproduksi sebagai respon atas pertanyaan moderator terkait dengan rongrongan partai pendukung untuk mendapatkan kemudahan dan uang. Lalu, PS mengeluarkan tuturan janjinya seperti tuturan [3], di mana kata ‘kita’ dalam tuturan tersebut mengandung makna ‘inklusivitas’ (melibatkan) orang lain yang menjadi anggota partai pendukungnya. Adapun tuturan [8] juga mengandung kata ‘kita’ yang

mengandung makna ‘inklusivitas’ (melibatkan) mitra tutur dalam suatu tindakan, yaitu rakyat berdasarkan atas konteks tuturan.

Pada [18] dan [19] yang disampaikan oleh JW, kata ‘kita’ memiliki maksud yang berbeda dengan kata ‘kita’ yang disampaikan oleh PS. JW pernah mengagagas adanya Kartu Sehat dan Kartu Pintar kemudian membagikannya kepada masyarakat yang tidak mampu ketika menjadi Gubernur DKI. Cara seperti ini akan diterapkan oleh JW untuk seluruh rakyat Indonesia yang tidak mampu apabila beliau terpilih menjadi presiden. Kartu tersebut diberi nama KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Berdasarkan atas konteks tuturan, kata ‘kita’ yang dimaksud adalah penutur sendiri dan pasangannya, dan kata ‘kita’ dalam tuturan ini berfungsi sebagai peranti pelunak tuturan. Khususnya untuk tuturan [18] dan [19] ini berfungsi sama dengan kata ‘kami’ sebagai peranti pelunak tuturan.

4.1.6 Tindak Tutur Berjanji yang Disampaikan dengan Verba Performatif Implisit (Tanpa IFID Berjanji)

Dari semua tindak tutur berjanji yang disampaikan kandidat hanya satu tuturan yang disampaikan dengan IFID berjanji secara eksplisit. Tuturan dengan IFID berjanji ini disampaikan oleh HR seperti pada tuturan [6]a berikut.

[6]a: *Pemerintahan Prabowo-Hatta **memastikan** bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L.(HR)*

[6]b: *Hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L. (HR)*

Tuturan [6]b adalah isi tuturan berjanji yang dihilangkan verba performatifnya (IFID berjanjinya tidak dimunculkan). Penutur menggunakan verba ‘memastikan’ dalam tuturan [6]a. Verba ‘memastikan’ termasuk kategori perangkat daya ilokusi berjanji (Searle, 1975 dalam Huang, 2007:102). Oleh karena itu, tuturan [6]a tersebut tergolong tindak tutur berjanji yang disampaikan dengan IFID berjanji secara eksplisit. Selain tuturan [6]a ini, semua tuturan berjanji dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden ini disampaikan tanpa IFID berjanji, seperti beberapa tuturan berikut ini.

- [1] *Kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras.... (PS)*
- [2] *Kami ingin menutupi bersama kebocoran. (P.11) / L. (PS)*
- [3] *Kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun. (P.11) / L*
- [4] *Apabila diberi amanat oleh rakyat maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini*
- [5] *Penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manejerial, kemampuan teknisnya. (P.11)/L.*
- [7] *Kami mendukung investasi asing tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat.*
- [8] *Harus kita perkuat koperasi, harus kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita harus mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL*
- [9] *Kami akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami.*

- [10] *Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan alokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.*
- [11] *Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L*
- [12] *Kami ingin membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L.*
- [14] *E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak on-line, IMB on-line, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita lakukan dan bisa dinasionalkan, semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah untuk megang pemerintahan ini. (P. 05) / L*
- [15] *Kami akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. (P. 33) / L*

4.2 Isi Tuturan Berjanji yang Diungkapkan oleh Para Kandidat

4.2.1 Janji yang Diungkapkan oleh Pasangan Capres dan Cawapres Nomor

Urut 1

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto (PS) dan Hatta Rajasa (HR) melakukan tindak berjanji yang mencakupi beberapa bidang. Pada debat putaran pertama sampai dengan putaran ke lima, mereka berjanji di antaranya 1) berjanji untuk membangun demokrasi, 2) berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan 3) berjanji untuk menegakkan kepastian hukum, 4) berjanji untuk membangun ekonomi, 5) berjanji untuk membangun kesejahteraan sosial, dan 6) berjanji untuk meningkatkan pangan.

Tabel 4.1: Tuturan Berjanji yang Diucapkan Kandidat Nomor Urut 1

| No. | Bidang | PS | HR |
|-----|---|--|--|
| 1. | Janji untuk membangun demokrasi | <i>[1] Kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras, yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, menyelamatkan kekayaan itu sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti, demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi rakyat kita, bukan demokrasi “wani piro”, bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif. (P. 33) / L.</i> | - |
| 2. | Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih | <i>[2] Kami ingin menutupi bersama kebocoran. (P.11) / L. [3] Kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun. (P.11) / L</i> | <i>[4] Apabila diberi amanat oleh rakyat maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam penggunaan lahan dan sebagainya. (P. 27) / L.</i> |
| 3. | Janji untuk menegakkan kepastian hokum | <i>[5] Penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manejerial,</i> | <i>[6] Pemerintahan Prabowo-Hatta memastikan bahwa</i> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <i>kemampuan teknisnya. (P.11)/L.</i> | <i>hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L.</i> |
| 4. | Janji untuk membangun ekonomi | [7] <i>Kami mendukung investasi asing tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat.</i> [8] <i>Harus kita perkuat koperasi, harus kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita harus mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / TL</i> | - |
| 5. | Janji untuk membangun kesejahteraan social | [9] <i>Kami akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami.</i> [10] <i>Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan alokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.</i> | - |
| 6. | Janji untuk meningkatkan pangan | - | [11] <i>Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di</i> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <i>Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) /L</i> |
|--|--|--|--|

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto (PS) dan Hatta Rajasa (HR), melakukan tindak berjanji yang dapat dijelaskan berikut ini.

4.2.1.1 Berjanji untuk Membangun Demokrasi

Ditemukan satu tuturan yang diungkapkan oleh PS tentang janji untuk membangun demokrasi. Tuturan tersebut terlihat dalam dialog seperti di bawah ini.

MD: Apa agenda yang anda anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu “Pembangunan Demokrasi dan Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum”?

[1] PS: *Kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras, yang pertama adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara, menyelamatkan kekayaan itu sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti, demokrasi yang produktif, demokrasi yang memberi kebaikan dan perbaikan hidup bagi rakyat kita, bukan demokrasi “wani piro”, bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif. (P. 33) /L.*

Tuturan [1] mengandung makna berjanji yang diungkapkan oleh PS. Ungkapan *apabila menerima mandat dari rakyat* dalam tuturan tersebut merupakan pemarkah temporal yang berarti bahwa tindak berkerja keras baru

akan dilakukan pada masa yang akan datang, yaitu apabila nanti sudah mendapat mandat dari rakyat (prospektif). Hal ini sesuai dengan kondisi berjanji, yaitu janji harus bersifat prospektif (kondisi 3).

Konteks situasi tuturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada sesi terakhir debat capres-cawapres 2014 putaran pertama, setelah penutur berbicara banyak tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum, penutur sebagai calon presiden ditanya oleh MD mengenai agenda penting yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan agenda penting tersebut adalah pekerjaan utama terkait dengan topik debat putaran pertama. Sehubungan dengan itu, penutur menjawab akan menyelamatkan kekayaan bangsa dan Negara sebagai agenda utamanya. Jawaban tersebut berimplikasi bahwa penutur menduga kekayaan bangsa dan Negara tidak aman dan penutur mengistilahkannya dengan kata ‘kebocoran’. Tetapi penutur tidak menyebutkan hal itu terjadi pada periode pemerintahan siapa dan seberapa besar kebocoran yang terjadi. Pengertian ‘kebocoran’ menurut penutur adalah derasnya aliran dana dan kekayaan Negara ke luar negeri akibat dari sistem eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan pihak asing.

Pemarkah lingual yang digunakan dalam tindak tutur tersebut yang menunjukkan makna tindak yang akan dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif) adalah kata “akan” seperti terlihat dalam tuturan “kami Prabowo Hatta apabila menerima mandat dari rakyat kami akan berkerja keras.....”

Juga pemarkah lingual “apabila menerima mandat” menunjukkan kondisi tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang pula.

IFID tindak tutur tersebut secara eksplisit tidak disebutkan yaitu IFID yang menunjukkan makna komisif. Akan tetapi, berdasarkan atas konteks situasi yang melingkupi tuturan itu dan pemarkah lingual tersebut di atas, tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur komisif tanpa IFID berjanji yang diungkapkan secara langsung.

4.2.1.2 Berjanji untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Terdapat tiga tuturan yang diungkapkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 mengenai janji untuk membangun pemerintahan yang bersih seperti disajikan berikut ini.

MD: Bila anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti apa langkah-langkah nyata yang akan anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan anda bersih, efektif serta stabil pada saat yang sama mampu menghindarkan diri dari kemungkinan rongrongan partai-partai politik yang telah mendukung anda dengan meminta anda untuk balas budi dan memberikan berbagai kemudahan mendapatkan uang?

[2] PS: *Kami ingin menutupi kebocoran. (P.11) / L.*

[3] PS: *Kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun. (P.11) / L*

[4] HR: *Apabila diberi amanat oleh rakyat maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam penggunaan lahan dan sebagainya. (P. 27) / L.*

Tuturan [2] dan [3] diungkapkan oleh PS untuk menjawab pertanyaan MD tentang langkah-langkah efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam ikatan kontrak politik dengan partai pendukung. Tuturan [2] diungkapkan dengan kata *ingin* yang dalam tuturan itu merupakan pemarkah temporal yang artinya tindak menutupi kebocoran tersebut baru akan dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif). Kondisi ini sesuai dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam tindak berjanji yaitu janji harus bersifat prospektif (kondisi 3).

Tuturan *....menutupi bersama kebocoran* mengungkapkan isi (*content*) atau makna yang menguntungkan mitra tutur, yaitu rakyat Indonesia secara umum. Dari penjelasan ini, isi tuturan tersebut juga memenuhi kondisi berjanji, yaitu kondisi 4 yang berbunyi bahwa janji harus memberikan keuntungan kepada yang menerima janji.

Konteks situasi tuturan tersebut adalah bahwa Indonesia adalah Negara yang sedang dilanda korupsi yang cukup parah, pemerintahan yang tidak bersih, dan hukum yang diperjualbelikan. Seperti pada tuturan sebelumnya yang dijabarkan panjang lebar oleh penutur tentang keadaan APBN, APBD dan kekayaan lainnya milik Negara yang dipandang oleh PS banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaannya sehingga hal ini sangat memperhatikan bagi rakyat Indonesia saat ini khususnya rakyat kecil dan yang tinggal di pelosok tanah air. Tentu keadaan ini butuh perbaikan dari seorang pemimpin pilihan rakyat.

Tindak tutur itu dituturkan secara langsung yang memiliki isi (*content*) tuturan, yaitu *Kami ingin menutupi bersama kebocoran*, dan waktu diwujudkan janji tersebut jelas, yaitu apabila penutur terpilih menjadi presiden nanti. Pemarkah lingual kata “ingin” tergolong pemarkah yang menunjukkan tindak yang akan dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif) yaitu menutupi kebocoran APBN, APBD, dan kekayaan lainnya milik Negara apabila terpilih menjadi presiden nantinya. Adapun kata ‘bersama’ dalam tuturan tersebut berfungsi sebagai ‘penjelas’ (*modifier*) verba ‘menutupi’, yaitu tindak ‘menutupi’ dilakukan secara bersama-sama dengan wakilnya, jajaran kabinet, serta semua pejabat pemerintahan lainnya. Kata ‘bersama’ mengandung implikasi bahwa ‘menutupi kebocoran’ tidak bisa hanya dilakukan oleh presiden saja, tetapi pekerjaan ini memerlukan keterlibatan dan dukungan penuh dari semua pihak dalam pemerintah dan bahkan dukungan rakyat.

Implikasi lainnya dari kata ‘kebocoran’ yang diungkapkan penutur menunjukkan bahwa terdapat kebocoran dana atau kekayaan Negara yang terjadi dalam pemerintahan selama ini, tetapi PS tidak menyebutkan periode pemerintahan siapa dan berapa jumlah kekayaan Negara yang bocor. Yang dimaksud dengan kebocoran dalam penjelasan PS adalah derasny aliran dana atau kekayaan ke luar negeri akibat dari eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang melibatkan pihak asing dalam bentuk kontrak jangka panjang (biasanya minimal 30 tahun). Di samping itu, bersasarkan atas makna implikasi tuturan tersebut bahwa kontrak-kontrak dengan pihak

asing itu cenderung merugikan Indonesia. Lalu, apakah tuturan tersebut masuk dalam kategori “kampanye hitam”? Peneliti dengan tegas menyatakan bahwa dalam kajian ini tidak dianalisis aspek politik atau jenis kampanye yang merupakan bidang kajian ilmu politik.

IFID berjanji sebagai pemarkah daya ilokusi tindak tutur tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tuturan tersebut. Tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur tanpa verba (berjanji), tetapi berdasarkan atas konteks situasi tuturan, konteks linguistik dan pemarkah lingualnya, tindak tutur tersebut sebagai tindak tutur komisif. Apabila dinyatakan secara eksplisit IFID-nya, maka akan berbunyi (*Kami berjanji kami ingin menutupi bersama kebocoran*). Jadi, berdasarkan atas konteks linguistik dan konteks situasi tuturan, tindak tutur *Kami ingin menutupi bersama kebocoran* ini tergolong tindak tutur komisif langsung tanpa IFID berjanji.

Tuturan [3] diungkapkan oleh PS terkait dengan kontrak politik dengan partai-partai pendukung. Sebelum menyatakan tuturan [3] tersebut PS menyatakan bahwa dirinya dan partai-partai pendukung bersatu padu tidak akan menyalahgunakan anggaran Negara. Kata *tidak* dalam tuturan tersebut bermakna negasi atau menolak untuk melakukan suatu tindakan, yaitu merongrong APBD dan APBN, dan kata *akan* dalam tuturan tersebut merupakan pemarkah temporal prospektif. Jadi kata *tidak akan* dalam tuturan itu berarti menolak untuk melakukan tindakan merongrong APBD dan APBN apabila nanti terpilih menjadi Presiden. Kondisi ini sesuai dengan salah satu

persyaratan yang harus dipenuhi dalam tindak berjanji yaitu janji harus bersifat prospektif (kondisi 3).

Kata ‘merongrong’ berkedudukan sebagai verba transitif dalam tuturan [3] yang bermakna ‘tindak menyalahgunakan’ anggaran Negara. Dalam perspektif pemilihan kata (diksi) yaitu kata ‘merongrong’ untuk tuturan semacam itu, maka kata ‘merongrong’ tergolong tepat karena terdapat kesesuaian antara unsur predikatif (merongrong) dengan unsur objektif (anggaran Negara). Maksud penutur dalam tuturannya yang menggunakan kata ‘merongrong’ adalah penutur berjanji menolak untuk melakukan ‘tindak menyalahgunakan’ anggaran Negara baik yang berupa APBN maupun APBD.

Kata ‘satu sen pun’ berfungsi sebagai penjelas terhadap objek kalimat (anggaran Negara) yang mengandung gaya antiklimak. Implikasi kata ‘satu sen pun’ dalam tuturan [3] adalah bahwa Penutur ‘sama sekali’ tidak menyalahgunakan dalam bentuk apapun, tidak mengurangi atau tidak mengambil ‘sedikitpun’ untuk kepentingan lain di luar ketetapan alokasi anggaran. Kata ‘satu sen’ merupakan jumlah terkecil dalam mata uang rupiah yang sekarang sudah tidak lagi digunakan. Jadi, penggunaan kata ‘satu sen pun’ merupakan penekanan gaya anti klimak yang digunakan oleh penutur dalam mengungkapkan pemikirannya sehubungan dengan janjinya tidak akan merongrong anggaran Negara apabila nanti terpilih menjadi presiden.

Konteks situasi tuturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat penutur berbicara Indonesia masih sedang dilanda banyak kasus korupsi. Di antara lahan yang rawan tindak korupsi adalah APBN dan APBD. Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan Indonesia yang melibatkan pejabat penting Negara banyak yang dimejahijaukan dan mereka mendekam di LP Sukamiskin. Penutur juga pernah menjadi pejabat penting Negara di lingkungan TNI pada pemerintahan Orde Baru sehingga dapat diasumsikan bahwa penutur sedikit banyak tahu tentang seluk beluk anggaran Negara khususnya di lingkungan kesatuannya.

Pemarkah lingual terlihat digunakan dalam isi tindak tutur tersebut yaitu kata *akan* yang menunjukkan suatu tindakan pada masa yang akan datang (prospektif). Atas dasar konteks situasi dan pemarkah lingualnya, tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur komisif meskipun IFID komisifnya tidak dinyatakan dalam tindak tutur tersebut. Apabila dinyatakan secara lengkap dengan IFID komisifnya dapat berbentuk: *(Kita berjanji) kita tidak akan merongrong anggaran Negara APBN, APBD satu sen pun.*

Implikasi lainnya dari tuturan [3] tersebut menunjukkan bahwa penutur berjanji tidak akan melakukan tindak korupsi khususnya menyangkut penggunaan APBN dan APBD apabila terpilih menjadi presiden. APBN dan APBD memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tindak korupsi oleh para pejabat Negara. Hal ini disebabkan bahwa kekuasaan dan anggaran bersentuhan langsung sehingga hubungan antara kekuasaan dan korupsi

memiliki hubungan yang dekat. Oleh karena itu, moral penguasa benar-benar diuji ketika membahas masalah anggaran.

Berdasarkan atas konteks linguistik dan konteks situasi, tuturan [3] tergolong tindak tutur berjanji i dalam kategori ‘menolak’ (*refusal*). Unsur penolakan ditunjukkan dengan pemarkah lingual ‘tidak akan’ dalam tuturan *Kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD satu sen pun*. Dengan kata lain, tindak tutur tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur komisif menolak (*refusal speech act of commissive*). Maksud tuturan tersebut bukan menolak atas tawaran atau pemberian dari orang lain, akan tetapi lebih pada pernyataan penolakan yang mengandung daya ilokusi berjanji tidak akan melakukan tindak merongrong anggaran negara. Jadi, dalam perspektif pragmatik, penolakan tidak selalu sebagai respon negatif atas pemberian atau tawaran, akan tetapi penolakan dapat sebagai pernyataan negatif penutur yang di dalam tindak tutur berjanji dikenal sebagai tidak tutur berjanji berkategori penolakan (*refusal*). Penolakan dalam tuturan berjanji [3] ini bukan sebagai respon negatif atas sebuah tawaran atau pemberian berdasarkan konteks tuturan.

Tuturan [4] diungkapkan oleh HR sebagai calon wakil presiden pasangan nomor urut 1. Klausa *Apabila diberi amanat oleh rakyat....* dalam tuturan tersebut merupakan pemarkah lingual yang menunjukkan bahwa tindakan (*mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor...*) yang merupakan isi janji akan dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif) yaitu apabila nanti terpilih menjadi

wakil presiden. Dalam isi janji tersebut penutur (HR) juga menggunakan modalitas ‘akan’ yang juga berfungsi sebagai pemarah lingual mengenai tindakan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Adapaun implikasi janji ini bahwa perilaku ketidakadilan, pandang bulu, ‘suka-tidak suka’ dalam berbagai pelayanan publik diharapkan dapat diminimalkan dan dihapus.

Konteks situasi yang melingkupi tuturan tersebut dapat diidentifikasi bahwa HR berpartisipasi aktif mendampingi PS dalam debat dan diminta menjawab pertanyaan yang diajukan kepada PS mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif apabila terpilih menjadi presiden. HR diberi kesempatan menjawabnya setelah PS selesai menguraikan jawabannya. Isi proposisi (*propositional contents*) tuturan tersebut adalah HR akan melakukan pencermatan yang ketat terhadap masalah-masalah diskriminatif di berbagai sektor seperti akses sektor ekonomi, akses sektor pendidikan, dan lain-lain.

Kata ‘pencermatan’ dalam tuturan [4] mengandung maksud penutur (*speaker's sense*) ‘pemeriksaan’ dan ‘evaluasi’ terhadap perilaku-perilaku diskriminatif di berbagai sektor. Hal ini berkaitan dengan adanya isu-isu praktek diskriminatif yang terjadi dalam kebijakan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum pejabat atau pegawai negeri dalam melakukan pelayanan terhadap rakyat. Praktek diskriminatif dipicu oleh adanya kesenjangan ekonomi dan sosial dan perilaku buruk pegawai sehingga pihak yang lemah cenderung tidak mendapatkan perhatian, pelayanan dan

perlakuan yang patut. Oleh karena itu, penutur berjanji akan melakukan ‘percermatan’ yang mendalam terhadap hal tersebut.

Tuturan [4] tersebut disampaikan secara langsung oleh HR dan berdasarkan atas konteks linguistik dan konteks situasi tersebut di atas, tuturan [4] dapat dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji secara langsung. Terlihat juga bahwa IFID tidak diungkapkan secara eksplisit, artinya verba berjanji tidak dinyatakan oleh penutur.

4.2.1.3 Berjanji untuk Menegakkan Kepastian Hukum

Tindak tutur berjanji yang diungkapkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 mengenai kepastian hukum terdapat dua tuturan seperti disajikan berikut ini.

MD: Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai Negara hukum Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil karena penegakan hukum di Indonesia cenderung di anggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas dan lagi pula banyaknya mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini pak Prabowo dan pak Hatta, apa agenda khusus, yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini?

[5] PS: *Penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya. (P.11)/L.*

[6] HR: *Pemerintahan Prabowo-Hatta memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L.*

Tuturan [5] tersebut berstruktur kalimat pasif digunakan penutur dalam menyampaikan tuturannya. Tuturan tersebut merupakan kalimat pasif langsung

dan pelaku (agen) dalam kalimat itu adalah penutur itu sendiri (PS). Berdasarkan konteks tuturan.

Konteks situasi tuturan tersebut dapat dijelaskan bahwa Indonesia termasuk Negara yang dilihat atau dianggap belum menegakkan supremasi hukum secara baik. Hal ini juga dinyatakan oleh moderator dalam pertanyaannya yang dilontarkan kepada para kandidat. Padahal penegakan hukum merupakan kunci dari penyelesaian segala masalah kejahatan termasuk pemberantasan korupsi. Penegakan hukum di Indonesia seringkali masih diwarnai praktek diskriminatif sehingga kejahatan termasuk korupsi masih terasa belum tuntas atau masih tetap berjalan. Kondisi semacam ini juga dinyatakan moderator sebelum melontarkan perntanyaannya seperti berikut.

Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai Negara hukum Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil karena penegakan hukum di Indonesia cenderung di anggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas dan lagi pula banyaknya mafia peradilan di dalamnya.

Sehubungan dengan itu, penutur (PS) telah menjelaskan hal-hal semacam itu pada tuturan-tuturan sebelumnya seperti pada kutipan di bawah ini sebelum menyatakan janjinya untuk memperbaiki peradilan di Indonesia dengan cara meningkatkan kemampuan manajerial dan teknik para penegak huku seperti dinyatakan dalam tuturan [5]. Artinya, Secara tidak langsung penutur berjanji memperbaiki para penegak hukum khususnya dalam aspek kemampuan manajerial dan teknis.

Baik, terimakasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal, dan keadilan hanya pada yang kuat, kepada yang kaya. Ini yang kita rasakan tetapi ini semua menurut kami ini adalah suatu akibat dari kebocoran-kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran-kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik. Akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur Negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya, korupsi terjadi di Republik Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut, takut masa depan, takut pensiun.

Pemarkah lingual “harus” digunakan oleh penutur sebagai modalitas yang menunjukkan tindak yang akan dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif). IFID komisif dalam tuturan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi atas dasar konteks situasi dan pemarkah lingual tersebut di atas tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur berjanji langsung berstruktur kalimat pasif bermodus instruksi, tetapi bermakna janji berdasarkan konteks tuturan.

Tuturan [6] diungkapkan oleh HR yang diberi kesempatan oleh MD untuk menjabarkan apa yang akan dilakukan apabila terpilih nanti dengan menjawab pertanyaan yang sama yang telah diajukan kepada PS. HR sedang dalam posisi menyimak penjelasan PS ketika PS menjabarkan panjang lebar apa yang akan dilakukan dalam pemerintahannya mengenai penegakan hukum. Begitu PS selesai, HR dipersilahkan menjawab pertanyaan yang sama, tetapi HR hanya memberikan uraian singkat dan menyatakan sesuatu seperti pada tuturan [6] tersebut. Sebelum menyatakan janjinya pada tuturan [6], HR menyatakan tentang tugas pemerintah terkait penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk seperti berikut ini.

Saya menambahkan ada waktu dua menit. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia.

Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan pernyataan janjinya terkait dengan kepastian hukum pada masa pemerintahannya nanti apabila terpilih seperti berikut.

Pemerintahan Prabowo-Hatta memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. (P. 04) / L.

HR menggunakan kata *memastikan* (*pledge*) dalam tuturannya. Kata tersebut tergolong salah satu kata yang digunakan dalam tindak tutur berjanji khususnya di depan umum sebagai IFID-nya (Kreidler, 1998:193). Juga kata *akan* pada isi janji digunakan oleh penutur yang menunjukkan bahwa tindakannya bersifat prospektif, yaitu baru akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Masalah diskriminasi yang dianggap masih berkembang dalam peradilan dipersepsi sebagai masalah penting untuk dihapus bagi semua kandidat. Ini menunjukkan bahwa praktek diskriminasi dilihat kandidat masih ada dalam peradilan Indonesia. Untuk menghapus diskriminasi tersebut, HR berjanji menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kebenaran. HR menyatakan singkat hal-hal terkait dengan hokum karena dipandang PS sudah banyak menyinggung soal hokum sehingga HR terlihat hanya memberikan ringkasan saja yang mengandung tuturan janji seperti dalam tuturan [6].

Aspek penting yang dapat ditangkap dari tuturan [6] tersebut bahwa tuturan ini terdiri dari dua klausa yang terdapat dalam isi janji. Klausa pertama berstruktur aktif dan klausa kedua berstruktur pasif. Subjek dalam klausa aktif adalah kata ‘hukum’,*hukum akan memperlakukan setiap warga Negara secara adil di depan hukum....* Ini menunjukkan bahwa kata ‘hukum’ mendapat penekanan dalam klausa pertama ini. Pada klausa kedua, penutur menggunakan kata ‘hukumlah’ yang diletakkan di awal kalimat yang mendapat penjelas frasa ‘*hanya kepada*’ dan partikel ‘*lah*’ dalam struktur pasif, seperti *dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan*. Kata ‘hukum’ juga mendapat penekanan dalam klausa kedua ini.

Frasa ‘*hanya kepada*’ dan partikel ‘*lah*’ digunakan oleh penutur untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lain atau tidak ada pilihan lain kecuali hanya satu objek tertentu. Jadi, dalam tuturan [6] tersebut bermakna tidak ada pilihan lain yang dijadikan dasar atau pegangan dalam memutuskan perkara kecuali hukum yang adil. Juga, hal ini menunjukkan bahwa penutur memandang bahwa hukum memegang peran sangat penting dalam menyelesaikan perkara termasuk dalam menghapus diskriminasi.

Jadi, atas dasar konteks situasi dan pemarkah lingualnya, tuturan [6] dapat dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji yang secara langsung diungkapkan dengan IFID berjanji, yaitu kata *memastikan*. Tuturan janji ini memiliki dua klausa dalam isi janjinya berstruktur aktif dan berstruktur pasif untuk menekankan sisi penting dalam tuturan, yaitu aspek hukum.

4.2.1.4 Berjanji untuk Membangun Ekonomi

Terdapat dua tuturan berjanji yang diungkapkan PS terkait dengan berjanji untuk membangun ekonomi seperti yang disajikan berikut ini.

MD: Investasi Indonesia hari ini didominasi oleh penanaman modal asing padahal di dalam konstitusi ada pelaku ekonomi yang lain seperti koperasi, BUMN, dan swasta. Bagaimana strategi dan kebijakan investasi yang anda tawarkan sesuai dengan konteks ekonomi kerakyatan?

[7] PS: *Kami mendukung investasi asing tetapi tentunya tidak boleh mematikan ekonomi rakyat. (P. 5) / L*

[8] PS: *Harus kita perkuat koperasi, harus kita perkuat usaha kecil dan menengah dan untuk itu kita harus mengalirkan mana yang lebih, yang masih, yang tidak tanggung-tanggung untuk memperkuat ekonomi rakyat. (P. 6) / L*

Tuturan [7] merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan kata ‘tetapi’ yang bermakna antagonis (bertentangan). Di dalam kalimat tersebut terdapat dua kondisi yaitu ‘investasi asing’ dan ‘keberadaan (aktivitas) ekonomi rakyat’. Tuturan ini diucapkan oleh PS setelah melakukan penjabaran misi sebagai jawaban dari pertanyaan MD.

Konteks situasi tuturan dapat dijabarkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh investasi asing dalam aktivitas perekonomian. Banyak perusahaan besar milik asing yang beroperasi di Indonesia dalam berbagai sektor, seperti pertambangan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Di sisi lain usaha-usaha nasional baik BUMN, swasta, koperasi, dan usaha kecil dan menengah lainnya juga tumbuh di negeri ini. Tentu, apabila pelaku usaha asing bergerak tanpa kendali ketat dari pemerintah maka akan mengancam para pelaku usaha domestik

sehingga diperlukan strategi dan kebijakan investasi yang tepat. Kondisi ini juga menuntut pemerintah yang akan datang untuk melakukan itu dan akan dipimpin oleh calon presiden terpilih dalam Pemilu, tanggal 9 Juli 2015.

Tuturan [7] tersebut merupakan isi tindak tutur yang dapat dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji untuk mendukung investasi asing bersyarat, yaitu investasi yang menopang ekonomi rakyat, bukan malah mematikan. Tuturan [7] ini dituturkan tanpa pemarkah lingual yang menunjukkan aspek prospektifnya, dan IFID berjanji dalam tuturan dapat ditangkap secara implisit. Jadi, atas dasar konteksnya, tuturan [7] dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji tanpa pemarkah lingual prospektif dan tanpa IFID berjanji.

Tuturan [8] merupakan kalimat majemuk yang memiliki hubungan sebab akibat antara induk kalimat dan anak kalimat. Modalitas ‘harus’ digunakan oleh penutur dan diberikan penekanan dengan menempatkan modalitas itu pada awal kalimat. Ini menunjukkan bahwa aspek ini penting dan mengikat penuturnya.. Tuturan [8] ini dituturkan sebagai jawaban atas pertanyaan MD tentang apa yang akan dilakukan penutur dalam membangun ekonomi pada masa yang akan datang.

Konteks situasi tuturan [8] dapat jelaskan bahwa koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) diakui sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kehidupan usaha tersebut dirasa banyak masalah, misalnya masalah permodalan, SDM, pengelolaan, dan masalah sumber daya lainnya. Karena berbagai masalah yang tidak terselesaikan itu, akhirnya usaha-usaha tersebut menjadi semakin lemah, tidak mampu bersaing, dan bahkan banyak yang gulung

tikar. Diakui oleh PS, masalah krusial yang dialami adalah masalah permodalan. Oleh karenanya, PS berjanji bahwa koperasi dan UKM harus diperkuat dengan cara menggelontorkan dana yang cukup untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Atas dasar konteks linguistik dan konteks situasi tersebut, tuturan [8] dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji. Tuturan [8] diungkapkan tanpa menyebutkan IFID berjanji secara eksplisit. IFID berjanji dalam tuturan itu dapat ditangkap secara implisit. Jadi, tuturan [8] sebagai tindak tutur berjanji yang mengikat penuturnya, yaitu PS meskipun subjek kalimat yang menunjukkan pelaku berupa kata ganti 'kita'. Tetapi kata 'kita' yang dimaksudkan dalam tuturan tersebut adalah PS dan rakyat yang secara bersama-sama saling mendukung mewujudkan janji tersebut apabila PS terpilih menjadi presiden RI.

4.2.1.5 Berjanji untuk Membangun Kesejahteraan Sosial

Sehubungan dengan berjanji untuk membangun kesejahteraan sosial, terdapat dua tuturan berjanji yang disampaikan PS seperti disajikan dalam dialog berikut. Juga dibahas berdasarkan konteks linguistik dan konteks situasinya.

MD: Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini, padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu? Dan bagaimana program anda ke depan?

[9] PS: *Kami akan naikkan penghasilan rakyat, rata-rata rakyat Indonesia dua setengah kali lipat dari sekarang, tiga juta perbulan menjadi enam juta perbulan di ujung lima tahun kami. (P.7) / L*

[10] PS: *Manakala saya menerima mandat dari rakyat saya akan mengalokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. (P.7) / L*

Tuturan [9] merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat intinya adalah ‘Kami akan naikkan penghasilan rakyat...’. Dalam tuturan ini, PS menggunakan modalitas ‘akan’ yang mengacu pada aspek temporal yang akan datang (prospektif). Pemarkah temporal prospektif lainnya juga digunakan oleh PS, yaitu frasa ‘di ujung lima tahun kami’. Ini artinya bahwa di akhir tahun masa jabatan PS apabila menjadi presiden janji ‘kenaikan penghasilan dari tiga juta menjadi enam juta’ dapat diwujudkan. Kata ‘kami’ digunakan sebagai deiksis persona yang mengacu pada PS dan HR sebagai pelaku dalam tindak tutur tersebut.

Konteks situasi tuturan [9] dapat dipaparkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Di sisi lain Undang-Undang sebagai aspek legal-formal mewajibkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Disepakati pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa anggaran dan program kemiskinan dalam porsi lebih besar agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Fakta berkata dan diakui bahwa kemiskinan dan pengangguran tetap saja meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu para kandidat presiden dan wakil presiden diminta menyatakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kondisi ini juga dijelaskan oleh moderator sebagai

pernyataan pengantar sebelum pertanyaan dilontarkan kepada kandidat seperti berikut.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini, padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu? Dan bagaimana program anda ke depan?

Ketika diberi kesempatan menjawab pertanyaan tersebut PS mengungkapkan janjinya terkait dengan program yang akan dilakukan ke depan, yaitu menaikkan penghasilan rakyat (tuturan 9) dan mengalokasikan dana 1 milyar ke desa-desa (tuturan 10). Peningkatan penghasilan rakyat dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian baru, pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, irigasi dan lain-lain seperti yang dijelaskan dalam tuturan PS berikut ini.

Kami akan menambah sawah dua juta hektar. Kami akan menambah dua juta hektar untuk beoetanol. Kami akan membangun tiga ribu kilometer jalan raya, empat ribu kilometer kereta api, delapan pelabuhan. Kami akan membuat Bank Tani dan Nelayan dan Bank Koperasi, dan juga lembaga tabung haji saudara-saudara. Dananya ada, uangnya ada, tinggal kemauan kita, kemauan kita, berani atau tidak kita kerja keras, berani atau tidak kita pangkas kebocoran, berani atau tidak kita berantas korupsi.

Tetapi PS tidak menjelaskan secara detail dan operatif bagaimana itu semua diwujudkan dan bagaimana mengukurnya. Meskipun begitu dalam perspektif pragmatik, tuturan PS dapat dikategorikan sebagai janji atas dasar konteks tuturan dan dalam kajian pragmatik ini peneliti tidak mengkaji bagaimana

janji tersebut ditagih karena hal itu bukan wilayah pragmatik. Juga, apakah tutuan tersebut bersifat normatif atau tidak normatif, itu di luar pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan konteks linguistik dan konteks situasi, tuturan [9] tergolong tindak tutur berjanji, yaitu berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. IFID berjanji tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dapat ditangkap secara implisit. Jadi, tuturan [9] adalah tuturan berjanji yang mengikat PS dan HR untuk melaksanakan isi janjinya itu untuk rakyat apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI.

Tuturan [10] *'.... saya akan mengalokasikan 1 milyar rupiah minimal satu tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia'* juga diungkapkan dengan modalitas 'akan' seperti pada tuturan [9]. Tetapi, tuturan [10] ini berbeda dengan tuturan lainnya dalam hal penggunaan kata ganti subjek kalimat. PS menggunakan kata 'saya' dalam tuturan [10] yang mengacu langsung pada dirinya sebagai penutur dan pelaku. Kata 'saya' dalam perspektif pragmatik dikategorikan sebagai deiksis persona yang mengacu pada orang pertama tunggal.

Konteks situasi tuturan [10] dapat diidentifikasi bahwa kemiskinan dan pengangguran di Indonesia juga banyak ditemukan di desa-desa, daerah terpencil dan daerah pedalaman. Di pelosok desa di negeri ini juga banyak ditemukan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, PS mengungkapkan tuturan [10] itu sebagai janji PS yaitu mencairkan dana segar sebesar 1 milyar setiap tahun ke desa-desa itu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan

pengangguran. Itu akan dilakukan dengan suatu syarat, yaitu apabila PS terpilih menjadi presiden. Penggunaan kata ‘saya’ secara pragmatik, dalam konteks ini, dapat ditangkap juga implikaturnya bahwa PS mau menunjukkan dirinya sebagai sosok yang *gentle*, tegas, dan percaya diri untuk mewujudkan janjinya itu di hadapan rakyat Indonesia.

Berdasarkan atas konteks linguistik dan konteks situasi tersebut, tuturan [10] termasuk tindak tutur berjanji dengan modalitas ‘akan’ dan tanpa ungkapan IFID berjanji secara eksplisit. Tetapi IFID berjanji dalam tuturan tersebut dapat dipahami secara implisit atas dasar konteks tuturan. Jadi, PS berjanji bahwa dia akan mengalokasikan dana minimal 1 milyar rupiah setiap tahun ke desa-desa di Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

4.2.1.6 Berjanji untuk Meningkatkan Pangan

Pasangan kandidat nomor urut 1 ini menyatakan berjanji untuk meningkatkan pangan. Terdapat satu tuturan tentang janji tersebut sebagaimana diungkapkan oleh HR yang disajikan dalam dialog berikut ini.

MD: Saya ingin mengajukan pertanyaan, dari penyampaian visi dan misi, Pak Prabowo-Hatta akan membangun kedaulatan pangan, Pak Prabowo-Hatta akan meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan produktifitas pertanian rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana upaya tersebut dilakukan?

[11] HR: *Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L*

Tuturan [11] diungkapkan oleh HR ketika menjawab pertanyaan moderator yang ditujukan kepada Prabowo-Hatta. Inti kalimat dalam tuturan [11] adalah *‘kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam’*. Kata ‘merencanakan’ digunakan oleh HR yang dapat dipahami sebagai pemarkah lingual yang mengacu pada suatu tindakan yang akan datang. Juga, kata ‘akan’ sebagai modalitas digunakan oleh HR yang mengacu pada aspek temporal yang akan datang (prospektif). Kata ‘kami’ sebagai subjek kalimat digunakan untuk menunjukkan keterlibatan orang lain yaitu PS. Jadi, ‘kami’ yang dimaksud dalam tuturan tersebut adalah PS dan HR. Dalam perspektif pragmatik, kata ‘kami’ merupakan deiksis persona yang mengacu pada orang pertama jamak. Dalam hal ini adalah PS dan HR sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Konteks tuturan [11] dapat dijelaskan bahwa lahan-lahan pertanian di negeri ini khususnya daerah yang padat penduduknya seperti Jawa sudah banyak yang berkurang karena pembangunan gedung-gedung pabrik, perumahan, dan lain-lain. Di luar Jawa lahan-lahan pertanian masih banyak berbentuk perkebunan dan hutan. Kondisi semacam itu dapat mengakibatkan berkurangnya pangan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan rakyat. Bahkan sudah ditemukan lahan sawah hilang sebanyak 730 ribu hektar. Oleh karena itu, HR berjanji untuk menambah 2 juta hektar sawah baru guna meningkatkan pangan rakyat.

HR menggunakan kata ‘seandainya...’ dalam tuturan [11] yang menunjukkan bahwa dirinya tidak memastikan diri akan terpilih, akan tetapi harapan terpilih tetap dimiliki. Kata tersebut berfungsi sama dengan kata ‘jika’

sebagai pemarkah lingual dalam konstruksi kalimat kondisional. Struktur kalimat dalam tuturan [11] mengandung daya ilokusi janji berdasarkan konteks tuturannya. Jadi tindak tutur berjanji ini diungkapkan oleh HR dengan model konstruksi kalimat kondisional. Penggunaan konstruksi kalimat kondisional dengan non kondisional akan terasa berbeda untuk mengungkapkan janji seperti tuturan berikut ini.

(a) Seandainya Prabowo-Hatta menerima mandat dari rakyat kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L

(b) Kami merencanakan akan menambah dua juta hektar sawah baru di Indonesia untuk menghadapi hilangnya 730 ribu hektar sawah yang menjadi konversi macam-macam. (P. 8) / L

Kalimat (a) berkontruksi kondisional sedangkan kalimat (b) non kondisional. Kalimat (a) terkesan tidak langsung dan lebih halus, sebaliknya kalimat (b) bersifat langsung dan kurang halus. Jadi, struktur kondisional dipilih bisa karena konstruksi tersebut bersifat tidak langsung dan terasa lebih halus untuk mengungkapkan janji.

Janji dalam tuturan [11] juga mengandung implikasi bahwa penutur sebagai kandidat menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil khususnya yang tinggal di desa-desa dan pelosok tanah air yang mata pencahariannya sebagian besar bertani. Calon pemilih di desa-desa dipandang potensial untuk mendulang suara kemenangan dirinya sebagai kandidat. Oleh karenanya janji yang mengandung makna perhatian terhadap kesejahteraan orang desa dirasa

efektif sehingga dilontarkan sebagaimana dalam tuturan [11] ini. Hal ini masuk akal karena apabila orang-orang desa dan mereka yang tinggal di pelosok tanah air kehilangan sawahnya atau lahan pertaniannya akibat dari konversi pembangunan di bidang property dan infrastruktur lainnya maka mereka akan kehilangan pekerjaan dan produksi pangan rakyat akan terancam dan yang pada gilirannya ketahanan dan kemandirian pangan akan terancam pula. Pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas perekonomian rakyat.

Berdasarkan konteks linguistik dan konteks situasi, tuturan [11] dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji, yaitu berjanji untuk meningkatkan pangan rakyat. IFID berjanji tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dapat ditangkap secara implisit. Meskipun penutur menggunakan kata ‘merencanakan’, itu bukan berarti bahwa tuturan tersebut hanya sebatas rencana tetapi itu merupakan tindak janji penutur untuk meningkatkan pangan rakyat. Hanya saja penggunaan kata ‘merencanakan’ sebagai satu cara penutur dalam mengungkapkan tindak tutur berjanji. Dalam perspektif pragmatik, kata ‘merencanakan’ bukan sebagai penentu apakah tuturan itu ‘janji’ atau ‘rencana’, tetapi kontekslah yang diakui sebagai penentu makna dalam pragmatik, bukan ‘kata’ atau bentuk lingual.

4.2.2 Janji yang Diungkapkan oleh Pasangan Capres dan Cawapres Nomor

Urut 2

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu pasangan nomor urut 2, Joko Widodo (JW) dan Jusuf Kalla (JK), melakukan tindak berjanji

yang dapat dijelaskan berikut ini. Tabel 4.3 menyajikan ringkasan tuturan berjanji yang diungkapkan oleh kandidat nomor urut 2 yang mencakupi enam bidang atau domain janji yang tersaji secara singkat dalam Tabel 4.3 di bawah ini. Selain itu, disajikan juga pembahasan tentang tuturan berjanji oleh pasangan kandidat nomor urut 2 ini berdasarkan atas konteks tuturan.

Tabel 4.2: Tuturan Berjanji yang Diucapkan Kandidat Nomor Urut 2

| No. | Bidang | JW | JK |
|-----|---|---|---|
| 1. | Janji untuk membangun demokrasi | [12] <i>Kami ingin membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...(P. 14) / L.</i> | [13] <i>Bangsa ini harus bersatu. Bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu, kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser pada keyakinan itu. (P. 17) / L</i> |
| 2. | Janji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih | [14] <i>E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB on-line. Cara-cara seperti itulah yang saya kira kita lakukan dan bisa dinasionalkan, semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah untuk memegang pemerintahan ini. (P. 05) / L</i> | |
| 3. | Janji untuk bekerja sangat keras membangun demokrasi, | [15] <i>Kami akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih</i> | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | pemerintahan yang bersih dan menegakkan kepastian hukum | <i>baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. (P. 33) / L</i> | |
| 4. | Janji untuk membangun ekonomi | <p>[16] <i>Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan, pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritime serta industrinya dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa dan infrastruktur. (P. 3) / TL</i></p> <p>[17] <i>Yang kedua adalah dobel trek kereta api, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa, yang di Kalimantan, di Papua, double track kereta api ini penting sekali. (P. 17) / L</i></p> | - |
| 5. | Janji untuk membangun kesejahteraan social | <p>[18] <i>Saya sampaikan akan kita berikan yang namanya kartu Indonesia pintar seperti ini untuk masyarakat anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu, akan kita berikan ini. (P. 8) / L</i></p> <p>[19] <i>Yang kedua juga akan kita berikan kartu Indonesia sehat seperti ini yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu.</i></p> | - |
| 6. | Janji untuk meningkatkan pangan | - | [20] <i>Jokowi-JK dalam kesempatan ini menyampaikan, pertama, soal pangan, soal pangan itu bagaimanapun kita</i> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p><i>harus tingkatkan produktifitasnya dengan cara penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat waktu dan perbaikan pengairan yang besar-besaran, kita harus jalankan itu dengan sistem yang ada bukan hanya beras, gula seperti itu, sawit seperti itu, dan lain-lainnya kebutuhan pokok lainnya. (P. 5-6) / L</i></p> |
|--|--|--|--|

4.2.2.1 Berjanji untuk Membangun Demokrasi

Ditemukan dua tuturan yang diungkapkan oleh calon pasangan nomor urut 2 tentang janji untuk membangun demokrasi. Tuturan tersebut terlihat dalam dialog seperti di bawah ini.

MD: Apa agenda yang anda anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu “Pembangunan Demokrasi dan Pemerintahan yang Bersih dan Negara Hukum”?

[12] JW: *Kami ingin membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak...*(P. 14) / L.

[13] JK: *Bangsa ini harus bersatu. Bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu, kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser pada keyakinan itu.* (P. 17) / L

Tuturan [12] mengandung makna berjanji yang diungkapkan oleh JW. Struktur tuturan tersebut adalah struktur kalimat aktif yang menggunakan subjek ‘kami’ sebagai deiksis persona pertama jamak yang mengacu pada penutur sendiri (JW) dan pasangannya (JK). Kata ‘ingin’ digunakan dalam tuturan tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai pemarkah temporal, yaitu pemarkah yang menunjukkan masa yang akan datang (prospektif), sesuai dengan kondisi berjanji, yaitu janji harus bersifat prospektif (kondisi 3). Juga terdapat frasa penjelas untuk kata ‘ramping’ yang menggambarkan maksud penutur yaitu jumlah parpol yang tidak banyak untuk dapat bergabung dalam jajaran cabinet JW dan JK apabila nanti terpilih menjadi presiden.

Konteks situasi tuturan tersebut dapat dijelaskan bahwa JW ditanya oleh MD terkait dengan agenda penting yang akan dilakukan apabila JW terpilih menjadi presiden menyangkut topik debat yang meliputi tiga hal yaitu demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Dengan mendasarkan atas fakta sekarang atau yang selama ini terjadi yaitu dominasi orang-orang parpol yang bergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan, maka JW berjanji untuk membangun demokrasi dengan koalisi ramping yang berbeda dengan bentuk koalisi yang selama ini berjalan.

Koalisi yang gemuk dari banyak partai rentan terhadap tuntutan dan pengaruh partai yang merasa ikut serta dalam suksesi kandidat sehingga mereka mengajukan berbagai tuntutan agar kepentingannya dapat dipenuhi oleh presiden terpilih. Misalnya Anggota partai yang meminta jatah kursi di kementerian atau posisi penting lainnya sementara tidak didukung oleh

keahlian bidang terkait. Hal ini dirasa JW dapat merepotkan. Lain halnya apabila koalisi ramping dapat dibangun, maka JW akan lebih leluasa dalam melakukan rekrutmen pejabat Negara yang didasarkan atas keahlian dan kemampuan bukan atas dasar pertimbangan anggota partai pendukung yang bergabung dalam suksesi pencalonan.

IFID tindak tutur tersebut secara eksplisit tidak disebutkan yaitu IFID yang menunjukkan makna komisif. Akan tetapi, berdasarkan atas konteks situasi yang melingkupi tuturan itu dan pemarkah lingual tersebut di atas, tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur komisif tanpa IFID berjanji yang diungkapkan secara langsung.

Tuturan [13] diungkapkan oleh JK sehubungan dengan pertanyaan MD tersebut di atas. Struktur kalimat pada tuturan tersebut merupakan kalimat kompleks yang terdiri dari enam kalimat. Dengan beberapa kalimat penjelas yang ditemukan menunjukkan bahwa struktur kalimat tersebut adalah kalimat kompleks. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi sebagai penegas (*intensifier*) kalimat utama yang mengandung isi janji yaitu ‘kami laksanakan itu’. Penutur tidak menggunakan pemarkah temporal apapun dalam tuturannya yang mengacu pada suatu masa tertentu, tetapi berdasarkan atas konteks tuturan tindak tutur tersebut merupakan tindak yang mengacu pada masa yang akan datang.

Konteks situasi tuturan [13] tersebut dapat dijelaskan bahwa JK memberikan penjelasan tambahan dari apa yang dijelaskan oleh JW

sebagaimana yang diminta oleh MD. Menurut JK, kehidupan demokrasi di Indonesia masih diwarnai oleh perseteruan, pertikaian, dan perpecahan baik di kalangan elit politik maupun di kalangan akar rumput (masyarakat bawah). Hal itu disadari bahwa Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, tradisi dan budaya yang berbeda-beda sehingga rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itu, JK berjanji mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa itu apabila nanti terpilih dan itu dipandang sebagai agenda utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Karena, menurut JK, hanya dengan kesatuan dan persatuan bangsa, semua program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, dan sulit kemajuan bangsa dapat diraih apabila perpecahan masih terus berkembang.

IFID berjanji dalam tuturan [13] tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi atas dasar konetks tuturan, tindak tutur tersebut dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji (komisif) tanpa IFID berjanji. Tuturan tersebut juga diungkapkan oleh JK secara tidak langsung mengungkapkan tuturan yang mendahului sebelum isi janji diutarakan sebagai konteks linguistik yang mendukung tuturan janjinya sebagaimana berikut.

Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini, banyak negeri ini yang saling membunuh akibat perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Saya tidak berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang keyakinan. Saya tidak berbicara tentang pidato, tetapi saya menceritakan itu telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini cukup karena meyakinkan kepada kita semua bahwa kami bukan hanya bicara.

Tuturan-tuturan JK tersebut di atas mengandung implikasi bahwa JK berkemampuan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan itu sudah dilaksanakan sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden 2015. Tuturan-tuturan tersebut juga terkait dengan tuturan [13] tentang janjinya yang berisi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bagian dari agenda demokrasi. Implikasi lainnya adalah bahwa JK menegaskan dirinya tidak hanya bertindak sebatas retorika akan tetapi fakta dan JK meyakinkan kepada rakyat bahwa dirinya berhasil dan optimis mampu menjadikan bangsa Indonesia bersatu walau dalam aneka macam perbedaan apabila terpilih menjadi Wakil Presiden 2014.

4.2.2.2 Berjanji untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Terdapat dua tuturan yang diungkapkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 mengenai janji untuk membangun pemerintahan yang bersih seperti disajikan berikut ini.

MD: Bila anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti apa langkah-langkah nyata yang akan anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan anda bersih, efektif serta stabil pada saat yang sama mampu menghindarkan diri dari kemungkinan rongrongan partai-partai politik yang telah mendukung anda dengan meminta anda untuk balas budi dan memberikan berbagai kemudahan mendapatkan uang?

[14] JW: *E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak on-line, IMB on-line. Cara-cara seperti itulah yang saya kira kita lakukan dan bisa dinasionalkan, semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini apabila Jokowi dan JK diberi amanah untuk megang pemerintahan ini. (P. 05) / L*

[15] JW: *Menurut kami yang paling penting parpol berani merombak ada recruitment yang baru di parpol kita sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan seperti yang ada di partai kami. Saya*

bukan ketua partai tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Yang kedua, sejak awal sudah kami sampaikan, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi kerja sama yang ramping, tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya kita kalau bekerja kita mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat terlebih dahulu bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan.

Tuturan [14] diungkapkan oleh JW untuk menjawab pertanyaan MD tentang langkah-langkah efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Struktur kalimat pada tuturan tersebut adalah struktur kalimat kompleks (majemuk) di mana objek penderita yang berupa *e-governance* yang mencakupi *e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak on-line, IMB on-line* diungkapkan pada awal kalimat sebagai bentuk penekanan pentingnya aspek tersebut. Struktur kalimat tersebut juga merupakan struktur kalimat kondisional yang menunjukkan adanya syarat yaitu *apabila Jokowi dan JK diberi amanah untuk megang pemerintahan ini*. Struktur kondisional ini juga dapat diartikan sebagai pemarkah temporal yang mengacu pada aktivitas yang akan datang.

Konteks situasi tuturan [14] tersebut adalah bahwa berdasarkan pengalaman atau rekam jejak JW selama menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, JW menjelaskan strategi efektifnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, yaitu dengan penggunaan teknologi dalam pemerintahan yang mencakupi semua bidang dan seluruh negeri sehingga diharapkan dapat memudahkan pencapaian tujuan dan pengawasan.

Menurut JW, kelemahan utama dalam pemerintahan Indonesia selama ini adalah terletak pada pengawasan yang tidak efektif. Kemajuan dan kecanggihan teknologi yang sekarang yang semakin pesat diakui sebagai media yang sangat mendukung dalam mewujudkan cara kerja pemerintahan yang efektif.

IFID berjanji sebagai pemarkah daya ilokusi tindak tutur tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tuturan tersebut. Tindak tutur tersebut tergolong tindak tutur tanpa verba (berjanji), tetapi berdasarkan atas konteks situasi tuturan, konteks linguistik dan pemarkah lingualnya, tindak tutur tersebut sebagai tindak tutur komisif.

Tuturan [15] diungkapkan oleh JW terkait dengan pertanyaan moderator tentang kemungkinan pengaruh dan rongrongan partai politik pendukung dalam upaya JW mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk menghindari pengaruh atau tuntutan partai politik pendukung yang tidak diinginkan, JW akan membentuk koalisi partai politik yang ramping dan tidak akan melakukan bagi-bagi kursi dan bagi-bagi kue di depan, tetapi lebih mendahulukan bekerja untuk kepentingan rakyat. Upaya tersebut diakui JW juga membutuhkan pola perekrutan yang baik oleh partai politik terhadap kadernya dengan mendasarkan atas pertimbangan kemampuan, rekam jejak, dan prestasi yang pernah diraih. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia partai menjadi pertimbangan utama untuk diusulkan bergabung dalam jajaran pemerintahan. Adapaun yang selama ini berjalan adalah partai lebih cenderung memprioritaskan kadernya yang memiliki jabatan struktural

lebih tinggi di partai dan lamanya bergabung dalam partai, bukannya pada keahlian, kemampuan dan rekam jejaknya. Untuk itu JW mencontohkan dirinya yang bukan pimpinan partai (PDIP) tetapi diajukan sebagai calon Presiden 2015 oleh partainya (PDIP).

Tuturan [15] “*Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya kita kalau bekerja kita mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat terlebih dahulu bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan*” tergolong kalimat majemuk berstruktur kalimat aktif. Kalimat inti dalam tuturan [15] ini adalah ...*kita mengedepankan kepentingan rakyat....*, mengandung implikasi bahwa kepentingan politik bukanlah yang utama meskipun penutur (JW) diusung oleh partai politik (PDIP dan partai pendukung lainnya) untuk maju sebagai kandidat presiden.

Kata ‘membagi-bagi menteri di depan’ mengandung makna pemberian posisi menteri untuk para anggota partai politik pendukung yang dilakukan presiden begitu terpilih. Hal ini dipandang JW bukan yang utama dilakukan dan bukan merupakan cara yang baik dalam perekrutan calon menteri dengan pertimbangan anggota partai politik pendukung. Tradisi prioritas posisi menteri bagi anggota partai pendukung memang telah menjadi opini publik selama ini, dan dipandang JW kurang patut untuk dilakukan.

Kata ‘membagi-bagi kursi di depan’ mengandung implikasi memberi jabatan ramai-ramai kepada para pendukung baik khususnya jabatan-jabatan

penting di pemerintahan. Hal ini juga berimplikasi bahwa tindakan ini bersifat negatif seakan itu yang menjadi tujuan utama JW apabila terpilih menjadi presiden. Oleh karena itu perilaku ini ditolaknya sebagai bentuk sikap anti ringrangan dari partai politik pendukung.

Kata ‘membagi-bagi kue di depan’ mengandung implikasi memberi beramai-ramai jabatan-jabatan enak, posisi-posisi basah kepada orang banyak, yaitu para pendukungnya atau memberi kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan uang kepada mereka sehingga mereka senang atas hal itu setelah JW terpilih menjadi presiden. Kata ini mengandung implikasi negatif yang biasa dilakukan oleh orang yang telah mendapat kemenangan dalam meraih jabatan untuk orang banyak sebagai kompensasi atas dukungan mereka. Perilaku semacam ini ditolak oleh JW untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh tuntutan dan tekanan partai politik yang menjadi pendukungnya.

4.2.2.3 Berjanji untuk Menegakkan Kepastian Hukum

Tindak tutur berjanji yang diungkapkan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 mengenai kepastian hukum terdapat satu tuturan seperti disajikan berikut ini.

MD: Kami minta anda meyakinkan rakyat Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri ini dan juga di ruangan ini bahwa di bawah kepemimpinan anda selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nantinya jika anda terpilih, bangsa dan negara Indonesia akan lebih baik dari kondisi saat ini dalam hal pembangunan

demokrasi pemerintahan yang bersih dan pembangunan negara hukum.

- [16] JW: *Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan, apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, sebab oleh rakyat memberikan amanah kepada kami, maka kami akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan. (P. 33) / L*

Tuturan [16] diungkapkan oleh JW di akhir penjelasannya tentang demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Struktur kalimat pada tuturan tersebut adalah struktur kalimat aktif dengan frasa penjelas dan klausa yang menjelaskan tujuan. Penutur menggunakan kata ‘kami’ sebagai subjek kalimat yang berfungsi sebagai deksis persona jamak yang mengacu pada penutur (JW) dan pasangannya (JK). Juga, penutur menggunakan kata ‘akan’ yang berfungsi sebagai modalitas dan pemarkah temporal yang mengacu pada masa yang akan datang (propsektif). Hal ini sesuai dengan kondisi kelayakan berjanji yaitu bersifat prospektif (kondisi 3).

Konteks situasi tuturan [16] tersebut dapat dinyatakan bahwa demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dan upaya-upaya yang dilakukan tidak maksimal sehingga ketiga hal tersebut masih menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirasa oleh JW merupakan agenda besar dan tugas besar sehingga untuk mewujudkannya diperlukan kerja sangat keras. Bekerja sangat keras tentunya diawali oleh pemimpin Negara sebagai tauladan bagi bawahannya dan rakyatnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-

tugas Negara masih tergolong rendah dan kurang maksimal. Ini terbukti dari pertumbuhan ekonomi rendah, pemerataan ekonomi tidak terwujud, kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan lain-lain. Di sisi lain, kekayaan Negara memang melimpah seperti kekayaan alam yang sesungguhnya dapat dijadikan sumber kekuatan untuk membangun bangsa, akan tetapi dalam kenyataan semua itu banyak dikuasai oleh pihak asing. Situasi semacam inilah yang dirasa menggerakkan JW berjanji untuk bekerja sangat keras mewujudkan pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum.

Klausa *‘Sesuai dengan pengalaman yang telah kita lakukan dan pengalaman yang telah kita buktikan’* yang mengawali janji JW dalam tuturan [16] mengandung implikasi meyakinkan rakyat dengan bukti atau rekam jejak keberhasilannya ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan JW untuk memenuhi permintaan moderator yaitu meyakinkan rakyat dengan pernyataan. Tuturan [16] juga mengandung janji yang lontarkan JW yang juga dimaksudkan dapat meyakinkan rakyat dengan isi janjinya yaitu bekerja sangat keras, bekerja siang malam untuk membangun demokrasi, pemerintahan yang bersih dan menegakkan kepastian hukum di Indonesia.

Tuturan [16] ini dinyatakan dalam bentuk kalimat kondisional yang berimplikasi bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan penutur mengapresiasi keberadaan rakyat sebagai pihak yang memilih dan menentukan siapa yang menjadi presiden terpilih. Implikasi tuturan diwujudkan dengan bentuk tuturan seperti *‘apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami, sebab oleh rakyat memberikan amanah kepada kami,’* Klausa ini juga merupakan

pemarkah lingual yang menunjukkan bentuk kalimat kondisional. Tuturan [16] tentu berbeda implikasinya apabila hanya diwujudkan dengan kalimat non-kondisional, misalnya *'kami akan berkerja keras, bekerja sangat keras, bekerja siang malam, agar demokrasi berjalan lebih baik pemerintah yang bersih bisa kita hadirkan kepastian hukum yang tegas bisa kita berikan'*. Tuturan ini terlihat langsung diungkapkan dan terasa kurang halus apabila dibandingkan dengan tuturan dengan struktur kalimat kondisional.

Jadi, atas dasar konteks linguistik dan konteks tuturan, tindak tutur [16] tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji (komisif) tidak langsung yang diungkapkan tanpa IFID berjanji. Tindak tutur tersebut diungkapkan dengan modalitas 'akan' sebagai pemarkah temporal, dan klausa sebagai pemarkah lingual konstruksi kalimat kondisional.

4.2.2.4 Berjanji untuk Membangun Ekonomi

Terdapat satu tuturan berjanji yang diungkapkan JW terkait dengan berjanji untuk membangun ekonomi seperti disajikan dalam dialog berikut.

MD: Investasi Indonesia hari ini didominasi oleh penanaman modal asing padahal di dalam konstitusi ada pelaku ekonomi yang lain seperti koperasi, BUMN, dan swasta. Bagaimana strategi dan kebijakan investasi yang anda tawarkan sesuai dengan konteks ekonomi kerakyatan?

[17] JW: *Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan, pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim serta industrinya dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa dan infrastruktur. Yang kedua adalah dobel trek kereta api, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa, yang di*

Kalimantan, di Papua, double track kereta api ini penting sekali. (P. 17)/L

Tuturan [17] diungkapkan oleh JW sebagai respon dari pertanyaan MD tentang pembangunan ekonomi dalam konteks ekonomi kerakyatan. Struktur kalimat pada tuturan tersebut adalah struktur kalimat aktif. Tuturan tersebut diungkapkan secara langsung mengenai jenis, ruang lingkup, dan kawasan pembangunan yang akan dilakukan oleh JW. Penutur menggunakan kata ‘ingin’ sebagai pemarkah temporal yang mengacu pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kondisi kelayakan berjanji yaitu bersifat prospektif (kondisi 3).

Konteks situasi tuturan [17] tersebut dapat dijabarkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh investasi asing dalam aktivitas perekonomian. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ekonomi dalam konteks ekonomi kerakyatan. Usaha-usaha kecil dan menengah (UKM), pasar-pasar tradisional, dan pasar komoditas kreatif kurang mendapat perhatian sehingga rakyat kecil mengalami kesulitan untuk berkembang. Pelaku UKM banyak mengalami kesulitan permodalan dan lemah dalam pengelolaan sehingga banyak yang gulung tikar. Pasar-pasar tradisional semerawut, becek dan kotor sehingga banyak dagangannya yang cepat rusak, pelanggan malas datang. Para pengrajin dan seniman mengalami kesulitan menjual karyanya atau hasil kreatifitasnya karena tidak mendapatkan tempat, apresiasi dan kesulitan pemasaran sehingga karyanya mangkrak.

Juga, pembangunan infrastruktur beberapa dekade yang lalu masih berfokus pada pembangunan infrastruktur di kota-kota dan ibu kota sedangkan di

desa-desa dan di seluruh pelosok tanah air banyak sekali yang belum tersentuh. Di samping itu, terlihat bahwa pembangunan masih berfokus di pulau Jawa sedangkan pulau-pulau lainnya banyak yang luput dari perhatian. Situasi inilah yang medasari JW berjanji akan melakukan pembangunan ekonomi yang berbeda, yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan yang secara langsung menyentuh rakyat kecil dan pembangunan infrastruktur di desa-desa.

Atas dasar konteks linguistik dan konteks tutran tersebut, tuturan [17] dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji yang diungkapkan secara langsung. Tuturan [17] diungkapkan tanpa menyebutkan IFID berjanji secara eksplisit. IFID berjanji dalam tuturan itu dapat ditangkap secara implisit. Jadi, tuturan [17] sebagai tindak tutur berjanji yang mengikat penuturnya, yaitu PS meskipun subjek kalimat yang menunjukkan pelaku berupa kata ganti 'kita'. Tetapi kata 'kita' yang dimaksudkan dalam tuturan tersebut adalah JW dan rakyat yang secara bersama-sama saling mendukung mewujudkan janji tersebut apabila JW terpilih menjadi presiden RI.

4.2.2.5 Berjanji untuk Membangun Kesejahteraan Sosial

Sehubungan dengan berjanji untuk membangun kesejahteraan sosial, ditemukan ada dua tuturan yang diungkapkan oleh JW sebagaimana tersaji dalam dialog berikut.

MD: Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini, padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun

pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu? Dan bagaimana program anda ke depan?

[18] JW: *Saya sampaikan akan kita berikan yang namanya kartu Indonesia pintar seperti ini untuk masyarakat anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu, akan kita berikan ini. (P. 8) / L*

[19] JW: *Yang kedua juga akan kita berikan kartu Indonesia sehat seperti ini yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu.*

Tuturan [18] dan [19] merupakan struktur kalimat aktif dengan penekanan modalitas ‘akan’. Letak modalitas ‘akan’ berada sebelum subjek kalimat dan bahkan terdapat klausa penegas di akhir kalimat. Modalitas ‘akan’ merupakan pemarkah temporal yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pada masa yang akan datang (prospektif). Subjek pada kalimat utama, penutur menggunakan kata ‘saya’ sedangkan pada kalimat yang merupakan isi janji penutur menggunakan kata ‘kita’. Kata ‘saya’ merupakan deiksis persona yang mengacu pada orang pertama tunggal, yaitu penutur sendiri, sedangkan kata ‘kita’ merupakan deiksis persona yang mengacu pada orang pertama dan kedua jamak, yaitu penutur sendiri dan rakyat (maksudnya dukungan rakyat).

Konteks situasi tuturan [18] dan [19] dapat dipaparkan bahwa penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah, hidup miskin, dan pengangguran masih tergolong tinggi sehingga menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. JW sebagai calon presiden punya pengalaman saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tentang penanganan masalah pendidikan rakyat,

kemiskinan, dan pengangguran. Pengalaman beliau adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Menurut JW bahwa rakyat harus sehat dulu sehingga program kesehatan rakyat khususnya masalah kesehatan rakyat yang tidak mampu harus menjadi perhatian utama. Dengan kartu tersebut, rakyat akan dapat pelayanan kesehatan biaya murah atau bahkan gratis. Kemudian Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat ekonomi rendah atau yang tidak mampu dapat bersekolah atau kuliah sehingga mereka diharapkan dapat peluang memperbaiki ekonominya karena memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pada saat menyampaikan tuturan tersebut, JW sambil menunjukkan contoh kartu yang dimaksud guna memastikan kepada rakyat bahwa langkah yang ditempuh adalah nyata dan dapat diwujudkan.

Berdasarkan atas konteks linguistik dan konteks situasi tersebut di atas, tuturan [18] dan [19] tergolong tindak tutur berjanji, yaitu berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi pengangguran dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). IFID berjanji dinyatakan secara eksplisit, yaitu 'Saya sampaikan....' Meskipun penutur menggunakan kata 'sampaikan', tuturan tersebut mengandung makna janji atas dasar konteks tuturan secara keseluruhan. Sedangkan isi janjinya adalah '.....akan kita berikan.....' Jadi, tuturan [18] dapat dikategorikan tindak tutur berjanji yang dituturkan secara langsung dengan IFID berjanji dan modalitas 'akan' berstruktur kalimat aktif.

4.2.2.6 Berjanji untuk Meningkatkan Pangan

Terdapat satu tuturan berjanji yang diungkapkan JK terkait dengan berjanji untuk meningkatkan pangan seperti disajikan dalam dialog berikut.

MD: Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi-JK berdasarkan pada visi dan misi yang Pak Jokowi-JK sampaikan akan membangun ketahanan pangan berbasis pada agribis kerakyatan melalui pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan. Pertanyaan saya, bagaimana upaya itu dilakukan dan bagaimana menghadapi strategi, menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan?

[20] JK: *Jokowi-JK dalam kesempatan ini menyampaikan, pertama, soal pangan, soal pangan itu bagaimanapun kita harus tingkatkan produktifitasnya dengan cara penyediaan bibit yang baik, pupuk yang tepat waktu dan perbaikan pengairan yang besar-besaran, kita harus jalankan itu dengan sistem yang ada bukan hanya beras, gula seperti itu, sawit seperti itu, dan lain-lainnya kebutuhan pokok lainnya. (P. 5-6) / L*

Tuturan [20] diungkapkan oleh JK ketika menjawab pertanyaan moderator yang berkaitan dengan kedaulatan pangan. Tuturan [20] berstruktur kalimat aktif majemuk (kompleks) di mana terdapat beberapa frasa penjelas dan klausa dalam struktur kalimat tersebut. Penutur menggunakan kata ‘harus’ sebagai modalitas yang menunjukkan tuntutan bagi penutur untuk melakukan sesuatu. Pemarkah lingual yang menunjukkan tindakan masa yang akan datang tidak terlihat dalam struktur itu. Kata ‘kita’ digunakan penutur di mana kata ‘kita’ merupakan deiksis persona yang mengacu pada orang pertama dan kedua jamak, yaitu penutur sendiri dan rakyat (dukungan rakyat).

Konteks tuturan [20] ini dapat dijelaskan bahwa kondisi pertanian Indonesia termasuk banyak tertinggal apabila di bandingkan dengan Negara-

negara lain seperti China, Jepang, Thailand, dan lain-lain, padahal lahan pertanian Indonesia cukup luas. Juga, para petani seringkali mengalami penurunan jumlah hasil panen, penurunan kualitas hasil panen dan/atau bahkan gagal panen karena berbagai faktor seperti serangan hama tanaman, bibit tanam yang kurang bagus, pengairan, pemupukan atau ketersediaan pupuk yang bagus, dan lain-lain. Hal ini tentu mengurangi produktifitas hasil pertanian sehingga dapat mengancam kedaulatan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemerintah seringkali melakukan impor bahan pangan sehingga aspek pangan dapat dikatakan tidak lagi berdaulat atau tidak berswasembada pangan. Apabila kondisi semakin berlanjut, maka kondisi petani dan pertanian akan terpuruk sehingga dapat mempengaruhi lain-lainnya secara keseluruhan. Atas dasar itu, JK berjanji dengan tuturannya itu untuk memperbaiki kondisi pangan dengan cara peningkatan produktifitas hasil-hasil pertanian.

Berdasarkan konteks linguistik dan konteks situasi tersebut di atas, tuturan [20] dikategorikan sebagai tindak tutur berjanji, yaitu berjanji untuk meningkatkan pangan rakyat dengan cara meningkatkan produktifitas hasil pertanian yang dapat ditempuh melalui perbaikan sistem pengairan, penyediaan bibit bagus, pupuk yang bagus, dan lain-lain. IFID berjanji tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dapat ditangkap secara implisit. Meskipun penutur menggunakan kata ‘menyampaikan’, bukan kata ‘berjanji’, tuturan tersebut mengandung makna janji berdasarkan atas konteks tuturan secara keseluruhan. Demikian juga, meskipun penutur tidak menggunakan pemarkah lingual yang

menunjukkan makna yang akan datang, tetapi tuturan tersebut mengacu pada tindakan yang akan datang apabila dipandang berdasarkan konteks tuturannya.

4.3 Perbedaan Bentuk Linguistik dan Isi Janji dalam Tuturan

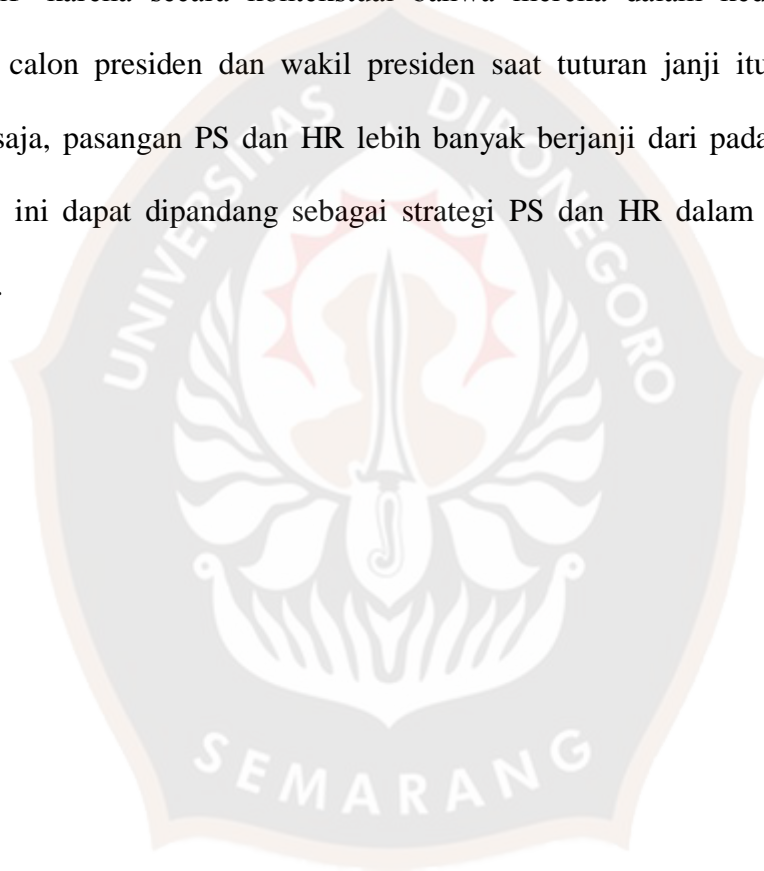
Perbedaan bentuk linguistik dalam tuturan yang disampaikan kedua pasangan dapat dijelaskan bahwa (1) PS dan HR cenderung menempatkan klausa kondisional di awal kalimat sedangkan JW menempatnya pada akhir kalimat sehingga PS dan HR lebih memberikan penekanan pada klausa kondisional itu. Selain kata 'kami', PS juga menggunakan kata 'saya' [tuturan 10] sebagai subjek kalimat yang menunjukkan 'ketegasan diri' penutur sedangkan HR dan JW tidak pernah menggunakan kata 'saya' dalam tuturan janjinya. (2) PS dan HR cenderung menggunakan modalitas kata 'harus' dan 'akan' dan hanya satu tuturan dengan kata 'ingin' yang disampaikan oleh PS [tuturan 2] sedangkan JW dan JK cenderung menggunakan kata 'ingin' dari pada kata 'harus' dan 'akan'. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif kebahasaan PS dan HR lebih menunjukkan 'ketegasan' karena kata 'harus' dan 'akan' sebagai modalitas bersifat lebih kuat dari pada kata 'ingin'. (3) PS dan HR lebih dominan menggunakan kata 'kami' dari pada kata 'kita' sedangkan JW dan JK lebih dominan menggunakan kata 'kita' dari pada kata 'kami'. Ini menunjukkan bahwa PS lebih menekankan inklusivitas diri dan pasangannya sedangkan JW dan JK lebih pada inklusivitas mitra tutur atau rakyat yang diharapkan dukungannya.

Perbedaan juga menyentuh penyampaian isi janji oleh kedua pasangan kandidat yang dapat dijelaskan bahwa PS dan HR menyampaikan isi janjinya

cenderung langsung dengan kalimat pendek sedangkan JW dan JK cenderung tidak langsung dengan kalimat lebih panjang. Dengan kata lain bahwa PS dan HR secara langsung mengutarakan apa yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Isi janji yang diutarakan itu juga disertai dengan argumen dan penjelasan dengan harapan dapat dipahami oleh mitra tutur. Hal ini disebabkan oleh latar belakang penutur. PS adalah orang Jawa (Semarang) berlatar belakang militer dan pendidikan Perwira Militer yang memiliki tradisi berbicara tegas dan langsung. Bahkan, PS cenderung lebih ‘meledak-ledak’ dalam penyampaian tuturannya yang menunjukkan keseriusan dan keyakinan diri dalam tradisi militer. HR adalah orang Sumatra, seorang teknokrat berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik (ITB).

Berbeda dengan JW dan JK bahwa mereka cenderung “berputar” terlebih dahulu sebelum menyatakan isi janjinya. Artinya, mereka menjelaskan hal-hal lain yang terkait sebelum isi janji itu diungkapkan. JW dan JK juga memberikan argumen dan penjelasan yang dapat mempertegas makna isi janjinya itu. Cara penyampaian seperti ini dapat disebabkan oleh latar belakang penutur. JW adalah orang Jawa (Solo) yang masih memiliki tradisi “kejawaan” yang kental di antaranya adalah bertutur kata tidak langsung, tidak ‘meledak-ledak’, dan tidak banyak penekanan dalam nadan bicaranya (cenderung datar) dan berlatar belakang profesi pengusaha (mebel) dan pendidikan Sarjana Kehutanan (UGM). JK adalah orang yang berasal dari Sulawesi berlatar belakang profesi pengusaha dan pendidikan Sarjana Ekonmi (Universitas Hasanuddin).

Isi Janji yang mereka sampaikan dapat dikategorikan sebagai janji yang realistis, artinya janji-janji mereka itu memiliki kemungkinan untuk dapat direalisasikan apabila terpilih menjadi presiden. Tidak ditemukan adanya janji yang ‘tidak realistis’, yaitu janji yang dipandang tidak mungkin direalisasikan oleh seorang presiden dan wakil presiden. Semua janji mereka memang bersifat ‘normatif’ karena secara kontekstual bahwa mereka dalam kedudukan masih sebagai calon presiden dan wakil presiden saat tuturan janji itu disampaikan. Hanya saja, pasangan PS dan HR lebih banyak berjanji dari pada pasangan JW dan JK, ini dapat dipandang sebagai strategi PS dan HR dalam menarik calon pemilih.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian tentang tindak tutur berjanji dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia tahun 2014 ini menghasilkan temuan yang dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini.

1. Bentuk linguistik tuturan berjanji yang disampaikan oleh para kandidat mencakupi beberapa macam bentuk linguistik di antaranya adalah a) tindak tutur berjanji yang disampaikan dengan struktur kalimat kondisional, b) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘ingin’, c) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘harus’, d) tindak tutur berjanji yang mengandung modalitas kata ‘akan’, e) tindak tutur berjanji dengan subjek kata ‘kami’ dan ‘kita’, dan f) tindak tutur berjanji yang disampaikan dengan verba performatif implisit (tanpa IFID berjanji).

Perbedaan bentuk linguistik dalam tuturan yang disampaikan kedua pasangan dapat dijelaskan bahwa (1) PS dan HR cenderung menempatkan klausa kondisional di awal kalimat sedangkan JW menempatnya pada akhir kalimat sehingga PS dan HR lebih memberikan penekanan pada klausa kondisional itu. (2) PS dan HR cenderung

menggunakan modalitas kata ‘harus’ dan ‘akan’ dan hanya satu tuturan dengan kata ‘ingin’ yang disampaikan oleh PS [tuturan 2] sedangkan JW dan JK cenderung menggunakan kata ‘ingin’ dari pada kata ‘harus’ dan ‘akan’. (3) PS dan HR lebih dominan menggunakan kata ‘kami’ dari pada kata ‘kita’ sedangkan JW dan JK lebih dominan menggunakan kata ‘kita’ dari pada kata ‘kami’.

2. Isi tuturan berjanji yang disampaikan oleh para kandidat mencakupi beberapa bidang, yaitu a) berjanji untuk membangun demokrasi, b) berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan c) berjanji untuk menegakkan kepastian hukum, d) berjanji untuk membangun ekonomi, e) berjanji untuk membangun kesejahteraan sosial, dan f) berjanji untuk meningkatkan pangan. Pada umumnya, tindak tutur berjanji dalam debat ini dilakukan dengan verba performatif implisit dan disampaikan secara langsung. Kategori tindak tutur berjanji dengan verba performatif implisit didasarkan pada IFID yang digunakan tidak dimunculkan (tidak dikatakan) oleh penutur. Kategori tindak tutur berjanji yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada bentuk tuturan yang digunakan penutur.

Perbedaan penyampaian isi janji oleh kedua pasangan kandidat dapat dijelaskan bahwa PS dan HR menyampaikan isi janjinya cenderung langsung dengan kalimat pendek sedangkan JW dan JK cenderung tidak langsung dengan kalimat lebih panjang. Isi Janji yang mereka sampaikan dapat dikategorikan sebagai janji yang realistis, artinya janji-janji mereka

itu memiliki kemungkinan untuk dapat direalisasikan apabila terpilih menjadi presiden.

5.2 Saran

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan penelitian selanjutnya (*further research*). Disadari bahwa masih ada beberapa celah atau titik yang tidak dapat dijangkau oleh peneliti sehubungan dengan keterbatasan sehingga diperlukan adanya rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagaimana berikut.

1. Direkomendasikan bahwa penelitian selanjutnya dapat mengkaji jenis tindak tutur lainnya karena penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur berjanji, sehingga dapat ditemukan adanya variasi tindak tutur yang dilakukan kandidat dalam debat presiden.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek lain dari pragmatik yang melekat pada setiap tindak tutur yaitu aspek kesantunan, khususnya kesantunan timur sehingga dapat ditemukan model kesantunan yang diterapkan dalam peristiwa tutur debat presiden.
3. Mengingat peristiwa tutur ini merupakan peristiwa politik maka penelitian selanjutnya dapat mengkajinya dalam perspektif pragmatik yang dikaitkan dengan perspektif komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantany, N. Fairuz. 2013. "The Use of Commissive Speech Acts and Its Politeness Implication: A Case of Banten Gubernatorial Candidate Debate". *Passage*, vol. 1 (2), hlm.21-34.
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press.
- Brown, P. dan Levinson, S. 1987. *Politeness*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chilton, P. 2004. *Analyzing Political Discourse*. London: Routledge, Inc.
- Fraser, B. 1990. "Perspectives on Politeness". *Journal of Pragmatics*, vol. 14 (2): 219-236.
- Gazdar, Gerald. 1983. *Pragmatics: Implicature, Presupposition, and Logical Form*. Florida: Academic Press, Inc.
- Goffman, E. 1967. "Embarrassment and Social Organization". *American Journal of Sociology*. vol. 62 (3).
- Huang, Yan. 2007. *Pragmatics*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Kreidler, Charles W. 1998. *Introducing English Semantics*. New York: Routledge.
- Leech, G. 1983. *Principles of Pragmatics*. London; New York: Longman.
- Loughery, Jessica. dan Ewald, Jennifer D. 2013. "Functional Theory from a Linguistic Perspective". *Issues in Applied Linguistics*, Vol. 19, pp. 63-84.
- Mey, J. L. 2001. *Pragmatics: An Introduction*. 2nd ed. Massachusetts; Oxford: Blackwell Publisher.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source book of New Methods*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Sari, Novika Negrita. 2014. "Tindak Tutur Komisif dalam Second US Presidential Debate". Tesis Magister. (Tidak Dipublikasikan). Malang: Universitas Brawijaya.
- Searle, J.R. 1975. *Speech Acts : An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge U.P.
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. New York: Hold, Rinehart and Winston.
- Sugiarto, Maria Christiani. 2015. "The Structures Of Argument In Indonesia Presidential Debates 2014". Tesis Magister. (Tidak Dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sulistyaningtyas, Tri. 2009. "Bahasa Indonesia dalam Wacana Propaganda Politik Kampanye Pemilu 2009: Kajian Sosiopragmatik". *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 17 Tahun ke 8, pp.1-9.
- Yule, G. 1996. *Pragmatics*. Oxford; New York: Oxford University Press.